



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA SUKU TANJUANG DENGAN SUKU KOTO DI NAGARI PAUH V KOTA PADANG

SKRIPSI



**TRYO NELYATA
0810112097**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA SUKU TANJUANG DENGAN SUKU KOTO DI NAGARI PAUH V KOTA PADANG**. Salawat beriring salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, pikiran dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terutama saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Alm. Jamaris (Papa) Hj. Nelyati (Mama) yang dengan penuh perjuangan membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai seperti saat sekarang ini. Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Padang yang telah memberikan waktu dan data yang di butuhkan penulis.

10. Buat Abang Risky Nelyata S.Pt, Uni Risse Seprima S.H, Adik Afrido Nelyata, Adik Fachri Rahmadan, Etek Bucit, Tek Ref, Fira, Yulianita dan keluarga yang lain merupakan keluarga yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam membuat karya tulis ini..
11. Buat yang sepesial Uci Mela Sari yang selalu menyemangati dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. Buat Deri, Diki, Nurma yang merupakan orang yang selalu memberi motivasi bagi penulis dan menjadi teman yang baik buat penulis.
13. Buat Vico Novindo, S.H, Vandra, Putra, May Rudi, S.H, Reza, Does, Chandra, Jimmy, Ayu, Bonita, Cimuik, Yanne, Fadil, Ryan, Benget, Diki dan teman seperjuangan yang lain yang tidak disebutkan di Kampus Merah khususnya angkatan 2008 yang telah bersedia menjadi teman bagi penulis dan selalu menyemangati penulis.
14. Buat Heru, Vinni, Vika dan teman-teman seperjuangan di KKN Kampuang Gadang yang lain.

Penulis menyadari *Tiada gading yang tak retak*, begitu pula dengan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 8 juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Pengumpulan Data.....	9
1. Metode Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Dan Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Pengolahan Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah Ulayat Di Minangkabau Serta Pewarisannya	
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	15
2. Hak Atas Tanah Ulayat.....	17
3. Bentuk Peralihan Tanah Ulayat.....	19
4. Macam-macam Tanah Ulayat.....	21
5. Sistem Pewrisan Di Minangkabau.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Indonesia	
1. Pengertian dan Jenis Perkara.....	23
2. Pengertian dan Jenis Sengketa.....	24
3. Proses Penyelesaian Sengketa.....	26
C. Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	
1. Penyelesaian Sengketa Tanah Di Minangkabau.....	29
2. Pengertian Fungsi Lembaga Adat.....	31
3. Peranan Lembaga Adat.....	32

BAB III : HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V.....	33
1. Objek Sengketa	33
2. Subjek-subjek Dalam Sengketa	34
3. Duduk Perkara.....	35
B. Proses Dalam Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V.....	39
1. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kota Padang.....	41

a. Duduk Perkara.....	42
b. Pendapat Hakim.....	46
c. Pertimbangan Hukum.....	46
d. Amar Putusan.....	47
2. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang.....	49
a. Risalah Pembanding.....	50
b. Risalah Terbanding.....	51
c. Pertimbangan Hukum.....	51
d. Amar Putusan.....	52
3. Penyelesaian di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.....	52
a. Risalah Pemohon.....	53
b. Pertimbangan Hukum.....	54
c. Amar Putusan.....	54
C. Kendala-kendala Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Ulayat Antara Auku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V.....	55
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam keberadaanya tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Dan fungsi dari tanah itu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia pada umumnya. Dimana tanah sangat di butuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal.

“Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*¹. *Conditio sine qua non* dalam bahasa latin menurut kamus hukum lengkap adalah syarat mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut “Absolute (ly) Conditio” yang menyatakan bahwa suatu syarat mutlak harus dicantumkan atau dinyatakan untuk menguatkan atau menetapkan sesuatu perjanjian itu berlaku². Hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah sangat vital sehingga disebut hubungan abadi.

Dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai masyarakat hukum adat di kenal dengan adanya hak ulayat. “Dimana hak ulayat itu adalah hak yang di

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 31

² Santos, <http://www.santoslolowang.com/hukum/penerapan-conditio-sine-gua-non>, tgl 17 mei 2012

punyai oleh satu suku sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya³.

Tanah mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan. Maka dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konstitusi ini di juga terdapat pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Menurut pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut dalam pasal 5 “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

³ *Ibid.*, hlm. 48 dikutip dari Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.2

Dalam hak ulayat terdapat didalamnya yaitu yang disebut tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan), bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogika atau termasuk keluarga suku dan kaum di Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau, tanah bukan sekedar obyek fisik material tetapi juga telah dikonstruksi secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sehingga tanah mempunyai beberapa makna bagi mereka:

1. Tanah sebagai identitas kultural

Tanah di pandang sebagai identitas kultural (cultural identity). "Identitas diri (self identity) orang Minangkabau selain dihubungkan dengan suku dan nagarinya juga dikaitkan dengan tanah:" Batapian tampek mandi, basasok bajarami, bapandam bapakuburan". (memiliki sumber air, memiliki tanah pertanian, memiliki tanah pemakaman).⁴

Bagi seseorang yang mengaku sebagai orang Minangkabau selain harus bisa menjelaskan suku dan nagari asalnya juga dituntut untuk mampu menunjukkan di mana lokasi "tapian sasok jarami, dan pandam pakuburan" (sumber air, tanah pertanian, dan pemakaman) kaum atau suku mereka. Ketidakmampuan dalam menunjukkan ketiga prasyarat kehidupan

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Tanah Ulayat dan Budaya Padi Minangkabau, (Jakarta: Yayasan Padi Indonesia, 2004), hlm. 43

dan simbol tersebut akan diragukan keabsahan dirinya sebagai orang Minangkabau.

2. Tanah sebagai status sosial

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah telah terbagi habis dan ada yang memilikinya:” *Kok tanah nan sabingkah alah bamiliak, kok rumpuik nan saalai alah bapunyo, malu nan alun babagi*”.(jika tanah sekeping telah dimiliki, jika rumput yang sehelai bsudah ada yang punya, malu yang belum berbagi)⁵.

Menurut adat Minangkabau, tanah hutan pun ada pemiliknya, yaitu hak ulayat nagari di mana semua anak nagari dapat memanfaatkannya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat Minangkabau, tanah dapat dijadikan sebagai indikator dari status sosial seseorang, makin banyak tanah pusaka yang dimiliki maka makin tinggi status sosial seseorang atau kaum. Banyaknya harta pusaka berhubungan dengan ”keaslian” seseorang atau kaum sebagai penduduk asal disuatu daerah itu. Dan orang atau kaum yang malakok (membaur dengan suku asal di suatu daerah) memiliki lebih sedikit tanah pusaka.

3. Tanah sebagai perekat sosial

Di Minangkabau, makin dekat seseorang ke pusat lingkaran pewarisan tanah pusaka makin dekat hubungan kekerabatan meterilineal, dan makin kental pula rekatan hubungan sosial. Pusat lingkaran pewarisan tanah pusaka bermula dari inti, kemudian melebar ke pinggiran, yaitu samande

⁵ Ibid., hlm.44

(seketurunan), kemudian saparuik (seibu), sanenek, saniniak, sakaum, dan sasuku.

4. Tanah sebagai sumber ekonomi.

Konsep masyarakat Minangkabau, semua tanah memiliki manfaat ekonomi:” *nan lereang tanami padi, nan tunggang tanami bambu, nan gurun jadikan parak, nan padek ka parumahan, nan munggu jadikan pandam, nan gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lancak kubangan kabau, nan rawang ranangan itiak*”. (yang lereng tanami padi, yang curam tanami bambu, yang gurun jadikan kebun, yang padat untuk perumahan, yang ketinggian jadikan kuburan, yang berlubuk jadikan tamabak ikan, yang padang tempat gembala, yang berlumpur kubangan kerbau, yang berawa renangan itik).

Dari makna tanah bagi masyarakat adat Minangkabau yang disebutkan di atas, dapat dilihat betapa dalam dan pentingnya arti sebidang tanah bagi masyarakat Minangkabau. Maka sebab itulah keberadaan tanah tersebut harus dipertahankan keberadaannya. Untuk memperoleh sebuah tanah, tentu memerlukan proses pemindahan hak atas tanah. Proses tersebut merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah secara sah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan hak. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat atau warisan.

Bentuk kepemilikan tanah dalam masyarakat Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan

nagari. Di mana proses pewarisan tanah itu, didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya kepemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut. Kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, pemakaman, perhiasan, dan sebagainya di masyarakat Minangkabau disebut dengan kata "pusako".

Moderenisasi membuat makna akan tanah bagi masyarakat di Minangkabau itu mulai bergeser dari makna di atas. Di mana semula masyarakat Minangkabau memakai sistem komunal sekarang bergeser ke sistem individual, dapat dilihat dari pola kehidupan dimasyarakat pada saat sekarang ini. Itu di sebabkan pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang berkembang pada saat sekarang ini. Sejalan dengan itu garis keturunan menurut garis ibu (matrilineal) bergeser pula kebentuk parental, pergeseran ini bagaimanapun berhubungan dengan masalah pewarisan dan kepemilikan harta, biasanya harta diwariskan mamak (paman) ke kemenakan (anak adik perempuan) atau secara garis ibu, dengan mendesakny kebutuhan ekonomi dan berubahnya pandangan terhadap harta benda, kini seorang bapak berusaha mewariskan harta ke anak dengan jalur hibah maka kemunculan sengketa tanah jadi biasa bila dilihat dari perubahan-perubahan orientasi ini, disamping adanya sistem tradisional yang ikut mendorong terjadinya sengketa tanah.

Masalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau. "Kenyataan ini terjadi karena, pertama, menurunnya peranan

penghulu terhadap kemenakan, sebab kemenakan merasa lebih bijak karena pendidikannya lebih tinggi, kedua, adanya dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah desa⁶. Inilah hal yang sering mengakibatkan susahny pemecahan atau penyelesaian sengketa adat di Minangkabau.

Menurut ajaran adat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam pepatah adat; "*Bajanjang Naik Batanggo Turun*" maksudnya dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan adat dilakukan secara bertingkat. Dimana penyelesaiannya melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) terlebih dahulu dengan musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak menemui penyelesaian baru lah dibawa ke Pengadilan. Dalam sengketa yang terjadi di Nagari Pauh V tidak memakai ajaran adat yang diungkapkan diatas tersebut. Dimana dalam penyelesaian sengketa hanya melalui pengadilan tanpa melalui tahapan penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari. Selain itu tanah (objek perkara) juga mempunyai beberapa subjek hukum (orang/kelompok) yang merasa berhak akan tanah (objek perkara) tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti perkara sengketa tanah ulayat ini, yang berjudul " **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA SUKU TANJUANG DENGAN SUKU KOTO DI NAGARI PAUH V KOTA PADANG**".

⁶ Syafan Akbar, <http://eprints.Undip.ac.id/23928/1/Syafan-Akbar.Pdf>, Tgl 12 Februari 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan:

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V tersebut?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V tersebut?
3. Apasaja kendala-kendala didalam penyelsaian kasus sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Negeri Pauh V tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab asal muasal terjadinya sengketa tanah hak ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui proses dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teorits

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti.
- b. Serta dapat menunjang perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat khususnya di Minangkabau.

2. Manfaat secara praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta bisa menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa mengenai penelitian sengketa tanah ulayat pada umumnya terutama kasus sengketa tanah ulayat yang diteliti penulis..
- b. Dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai sengketa tanah ulayat yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yakni pengamatan terhadap aturan hukum seperti dilaksanakan dalam perilaku masyarakat dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dimana memberikan gambaran secara rinci bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto, di Nagari Pauh V, di Kota Padang. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁷.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (**library research**) yang meliputi :

- a) Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku hukum yang dimiliki
- d) Website

2) Penelitian Lapangan

Adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (**field research**) yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padang dan para pihak yang bersengketa.

⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 23.

b. Jenis Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang dan para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat antara suku tanjuan dengan suku koto, di nagari pauh v, di kota Padang, termasuk, pengurus Kerapatan Adat Nagari, sedangkan sebagai objeknya adalah tanah serta penyebab sengketa itu sendiri.

2) Data sekunder

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari:

(1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

(3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari.

(4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Terdiri dari

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm 52.

bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- (1) Buku-buku ilmiah
- (2) Makalah-makalah
- (3) Dokumen - dokumen serta salinan - salinan putusan-putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku serta peraturan Perundang – undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan terhadap sengketa tanah tersebut.

b. Wawancara

Adalah suatu cara untuk memperoleh data serta informasi dengan bertanya langsung secara lisan kepada responden. Wawancara

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 114

dilakukan secara semi terstruktur dimana terlebih dahulu dipersiapkan beberapa pertanyaan dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang disusun dalam pelaksanaan analisis selama interviu.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah Memperoleh data maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah :

a. Editing

Meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹¹

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni menilai data yang untuk disajikan berdasarkan perundang-undangan dan kesimpulan dari data, lanjutkan untuk menarik kesimpulan yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penulisan yang jelas dan sistematis, maka disini penulis akan menyusun hasil penelitian sesuai dengan jawaban atas masalah yang dikemukakan ke dalam IV Bab.

Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

¹¹ *ibid*, hlm, 125

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan membagi 3 (tiga) sub bab, yang pertama, yaitu: tinjauan umum mengenai tanah dan tanah hak ulayat di Minangkabau serta pewarisannya. Sedangkan sub bab yang kedua membahas tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau. Kemudian sub bab yang ketiga membahas tentang peranan lembaga adapt dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini penulis membahas tentang penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V , proses daolam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Nagari Pauh V, kendala-kendala dalam penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto di Negeri Pauh V.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A).Tanah Ulayat di Minangkabau Serta Pewarisannya.

1. Pengertian Tanah Ulayat

Pendapat para ahli mengenai tanah ulayat:

a. Adrian Sutedi

"Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utamabagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa"¹².

b. Hilman Hadikusuma

"Tanah Adat/ kerabat merupakan milik bersama (kerabat – sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi atau milik perorangan"¹³.

c. Ter Haar

Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan kuno disebut dengan hak *eigendom* (*eigendomsrecht*) dan hak yasan komunal (*communal bezitsrecht*). Hak terakhir ini menimbulkan jalinan-jalinan yang ruwet, maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal itu dengan *beschikkingsrecht* (hak pertuanan), yang akhirnya menjadi istilah teknis (Haar, 1981: 7172)¹⁴.

Secara etimologi, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dinyatakan bahwa hak ulayat adalah hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah. Jadi tanah ulayat adalah tanah yang didalamnya melekat hak ulayat yang dimiliki secara bersama oleh anggota persekutuan dalam masyarakat adat.

¹² Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 48

¹³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hlm 119.

¹⁴ Ter, Haar, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 71-

mengolah, dan menikmati hasil dari tanah ulayat tersebut namun hak kepemilikannya tetap milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Kepemilikan tanah ulayat merupakan milik bersama atau disebut dengan persekutuan.

Kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat (*beschikkingsrecht*) dapat dibagi dua, *pertama*, berlaku ke dalam, bahwa masyarakat atau anggota-anggotanya berwenang menggunakan hak pertuanan itu dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah kekuasaannya. *Kedua*, kewenangan berlaku keluar, bahwa orang luar dari masyarakat yang bersangkutan hanya boleh memungut hasil pertuanannya, setelah mendapat izin dari persekutuan yang bersangkutan, orang-orang luar tersebut juga harus membayar uang pengakuan di muka, serta uang penggantian di belakang¹⁷.

Kepastian hak atas tanah ini diperjelas dengan pepatah adat lainnya yang menyatakan; *adat salingka nagari, harato salingka suku (adat sekitar nagari, dan harta sekitar suku)*. Maksud dari pepatah adat diatas yakni, adat di suatu nagari akan berlaku dan dapat diberlakukan hanya dalam nagari tersebut saja, sedangkan harta yang dipunyai oleh suku hanya dapat dikuasai dan dimiliki oleh suku tersebut harus mempertahankannya, sehingga dapat dinikmati secara turun-temurun oleh anak cucu mereka, ini berpegangan pada ranji (silsilah keturunan) suatu kaum. Dan ranji itu merupakan bukti dari keberadaan suatu suku beserta keturunannya.

2. Hak atas tanah ulayat

Hak ulayat adalah kekuasaan atau kewenangan dari masyarakat hukum adat atas sebuah wilayah atau ruangan tertentu yang terdapat dalam lingkungan hidup masyarakat adat tersebut untuk menikmati sumber alam

¹⁷ Ter Haar dalam Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press: Padang, hlm 54

untuk kelangsungan hidupnya”¹⁸. Hak Ulayat juga dapat diartikan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak diwilayahnya (nagari). Hak ulayat bersifat Magis Religius tersebut merupakan yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kelangsungan kehidupannya.

”Sedangkan menurut Ter Haar mengatakan bahwa hubungan antara hak persekutuan dengan hak perseorangan dalah seperti ”teori balon”. Artinya semakin besar hak persekutuan maka semakin kecil hak perseorangan, sebaliknya semakin kecil hak persekutuan maka semakin besarlah hak perseorangan¹⁹.

”Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat ialah sebagai berikut:

- a. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukarnya dalam wilayahnya dengan bebas seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasil, berburu, mengembala dan lain sebagainya.
- b. Yang bukan anggota-anggota persekutuan hukum dapat pula mempergunakan itu, tetapi hanya atas pemberian izin dari persekutuan hukum itu tanpa izin ia membuat kesalahan.
- c. Dalam mempergunakan tanah itu bagi anggota hanya kadang-kadang tapi yang bukan anggota harus selalu membayar sesuatu (*recognatie*).
- d. Persekutuan hukum juga mempunyai tanggungjawab atas beberapa kejahatan tertentu yang terjadi di dalam lingkungan wilayahnya. Bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat atau dikenal.
- e. Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selamanya kepada siapapun.
- f. Persekutuan hukum mempunyai hak percampur tangan juga terhadap tanah yang telah digarapnya seperti dalam pembagian perkarangan, dalam jual beli tanah dan lain sebagainya²⁰.

¹⁸ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, hlm 76

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 32

²⁰ Titi Dianti Putri, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Pada Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.19

Hak ulayat dalam masyarakat hukum adat berlaku keluar dan kedalam. Untuk berlaku keluar, yang bukan warga masyarakat adat (persekutuan) tidak diperbolehkan dalam hal menggarap tanah yang merupakan hak dari persekutuan tersebut. Hanya bisa di garap apabila memperoleh izin dari masyarakat persekutuan. Berlaku kedalam, bahwa setiap warga masyarakat adat (persekutuan) memiliki hak untuk menggarap tanah persekutuan, karena persekutuan merupakan satu kesatuan, semua berhak untuk mengambil hasil dari tanah tersebut.

3. Bentuk peralihan tanah ulayat

Pada umumnya peralihan terhadap tanah ulayat terjadi secara peralihan umum, seperti :

- a. Penjualan yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar tunai.
- b. Pertukaran yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dengan mendapatkan penggantian akan tanah pada tempat yang berbeda letaknya.
- c. Penggadaian yaitu perpindahan hak untuk sementara waktu, dengan menerima sejumlah uang, tanah akan diperoleh kembali jika telah mengembalikan sejumlah uang yang diterima dari pemegang gadai.
- d. Hibah yaitu pemberian tanah kepada seseorang, dan lembaga untuk sementara atau selamanya.
- e. Persewaan yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu (sesuai jangka waktu yang telah ditentukan) dengan mendapatkan pembayaran berupa sewa²¹.

Dalam adat Minangkabau peralihan seperti hibah dan gadaisangat sering terjadi dan mempunyai pengertian yang berbeda dari hukum nasional. Ini dapat dilihat bahwa hibah menurut adat Minangkabau terdiri dari 3 macam²²;

1. Hibah laleh yaitu Pemberian seseorang kepada orang lain atau kepada sebuah lembaga untuk selama-lamanya, dengan syarat sepakat dari ahli warisnya kalau masih mempunyai waris batali

²¹ Van dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia (terjemahan oleh A. Soehardi), Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm.65-68.

²² Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, hlm.126

darah. Namun apabila tidak ada lagi maka harus ada kesepakatan dari waris bertali adat.

2. Hibah bakeh yaitu harta pusaka yang dihibahkan seorang bapak yang telah punah (habis keturunan) kepada anak kandungnya. Sifatnya hanya untuk anak yang di tunjuk dan apabila anak tersebut tidak ada lagi maka tanah tersebut akan kembali kepada suku asalnya. Ini lah menurut aturan adat Minangkabau.
3. Hibah papeh yaitu harta pusaka tinggi yang diberikan seorang penghulu anak kemenakannya atau orang lain, mungkin karena banyaknya harta pusaka, atau mungkin karena punah maka dibolehkan oleh adat.

Sedangkan Gadai mempunyai arti yaitu hubungan antara seorang dengan benda (tanah) kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang (uang) kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar maka benda (tanah) tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai yang memberi utang dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Penebusan benda atau tanah tadi tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadai²³.

"Pagang gadai tanah ulayat di Minangkabau berbeda dengan pagang gadai menurut Undang-Undang Agraria. Menurut Undang-undang Agraria obyek dari gadai itu sendiri adalah tanah. Obyek pagang gadai menurut hukum adat di Minangkabau bukan tanah tetapi hak mengelola atau menikmati hasil. Alasannya ialah kembali kepada asas pertama tanah ulayat yaitu asas terpisah, yakni terpisah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya²⁴.

Untuk peralihan hak tanah seperti penjualan tanah ulayat menurut ajaran adat Minangkabau itu tidak dibenarkan. Tanah ulayat hanya dapat beralih sesuai dengan pepatah adat "*Mambangik Batang Tarandam, rumah gadang katirihan, gadih gadang tak balaki, mayat tabuju tangan rumah*", maksudnya tanah hanya bisa beralih dengan sebab-sebab ini saja, untuk meningkatkan martabat kaum, untuk memperbaiki rumah gadang, untuk mengawinkan anak perempuan yang besar dalam rumah yang belum

²³ Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Alumni Bandung, 1997, hlm. 57

²⁴ Idrus Hakimy, *Op.cit.*, hlm.78-79

ada jodoh, untuk penyelenggaraan pemakaman. Hal inilah yang bisa sebagai alasan peralihan tanah ulayat.

4. Macam-macam tanah ulayat

Penguasaan tanah yang terdapat pada masyarakat hukum adat Minangkabau diantaranya tanah komunal (milik bersama). Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat di Minangkabau (Sumatera Barat) terbagi atas 4 (empat) bentuk²⁵:

- a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berda diatasnya dan didalamnya merupakan hak kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
- d. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Minangkabau (Sumatera Barat).

5. Sistem Pewarisan Di Minangkabau

Dalam adat Minangkabau mempunyai tata cara perpindahan harta waris (pemilik harta) kepada waris atau ahli waris (penerima harta yang dialihkan) yang akan menjadi miliknya setelah pemilik asalnya meninggal dunia seperti yang diungkapkan "*warih dijawek, pusako di tolong*" maksudnya warisan diterima untuk menolong pusaka yang di tinggalkan"²⁶.

²⁵ Dapat dilihat di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

²⁶ Dalam Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau tahun 2002, hlm.64

Dalam hukum adat Minangkabau di kenal beberapa asas dalam pemanfaatan dan pewarisannya tanah ulayat yaitu²⁷:

- a. Asas terpisah, ialah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan diatasnya.
- b. Asas komunal adalah tanah pusako tinggi yang dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang *ganggam bauntuak*.
- c. Asas keutamaan berarti bahwa kamanakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusako tinggi kalau daibandingkan kemenakan bertali adat dan seterusnya.
- d. Asas unilateral adalah bahwa pewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan yaitu garis kekerabatan melalui ibu (Matrilinial).

Harta pusaka di klasifikasikan dalam dua bentuk yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang di turunkan dari nenek moyang atau dari tiga keturunan sebelumnya. Pewarisannya diberikan berdasarkan asas kolektif kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Mereka hanya memperoleh hak pakai atau atas dasar hak "*ganggam bauntuak*" dan bukan merupakan hak milik.

Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarki menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut²⁸.

Sedangkan harta pusaka rendah/ tanah pusako rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruik berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan pencaharian, dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Pewarisan harta pusaka rendah ini berdasarkan hukum islam²⁹.

²⁷ Ibid, hlm.75-76.

²⁸ Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

²⁹ Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung, 1985, hlm.5

Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi, Ahli waris bertali darah (warih nan dakek) adalah ahli waris kandung. Maksudnya meninggal seorang ibu maka yang menjadi warisnya yang pertama-tama adalah anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta kemudian keturunan selanjutnya dari mereka ini. Mereka ini sering diistilahkan dengan waris satapak (selebar telapak tangan), waris sajangka (sejengkal), waris saheto (sampai siku), dan waris sedepa (sepanjang tangan). Apabila keempat ahli waris tersebut tidak ada lagi maka di berikan kepada ahli waris batali adat (warih nan jauh). Yang dimaksud dengan ahli waris batali adat yaitu waris yang berada dalam lingkungan satu nagari dengan pewaris dan merupakan masyarakat hukum adat di nagari tersebut.

B). Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Indonesia.

1. Pengertian jenis dan jenis perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perkara adalah masalah, persoalan atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)"³⁰. Jadi perkara adalah penuntutan agar orang yang merugikan orang lain mengembalikan kerugian; permohonan pengakuan terhadap suatu keadaan tertentu dari orang lain.

Dalam perdata mempunyai dua bentuk, yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa (contentius)

³⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.757

”Permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan di pengadilan yang gugatan/tuntutan haknya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih”³¹. Ini di tujukan untuk memerintahkan orang lain yang tindakannya menimbulkan kerugian, dan harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang yang dirugikannya tersebut.

b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (voluntair)

Perkara voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri³².

”Permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan di pengadilan yang gugatannya/tuntutan haknya tidak mengandung sengketa atau berupa permohonan (semata-mata untuk kepentingan pemohon)”³³.

Dalam prinsipnya perkara tanpa ada sengketa dengan orang lain.

2. Pengertian dan jenis sengketa

Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan dan konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antar orang-orang, kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan ”conflict” atau ”dispute”. Keduanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.

³¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sianr Grafika, Jakarta, 2005.hlm. 46

³² *Ibid*, Buku II MA RI , hlm.110, angka 5 huruf (a)

³³ *Ibid*.

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.³⁴

Ada dua jenis sengketa pada umumnya, yaitu:

a. Sengketa privat adalah perselisihan yang melibatkan individu-individu.

”Ciri-ciri sengketa privat yakni;

- 1). Pihak yang mengalami kerugian umumnya menyangkut kepentingan sedikit orang atau yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang tertentu.
- 2). Kepentingan para pihak pada umumnya selalu terkait dengan kerugian materiil.
- 3). Pokok sengketa berkaitan dengan sewa-menyewa, utang piutang dan masalah keluarga”³⁵.

b. Sengketa publik adalah perselisihan yang terjadi antara individu dengan badan hukum atau negara

”Ciri-ciri sengketa publik adalah:

- 1). Pihak yang mengalami kerugian biasanya dalam jumlah yang banyak.
- 2). Pihak-pihak yang terlibat tidak selamanya pihak yang mengalami kerugian materiil.
- 3). Pokok sengketa berkaitan dengan sengketa publik, misalnya sengketa Tata Usaha Negara dirugikan oleh kesalahan pejabat dalam mengambil keputusan”³⁶.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasaan dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.

Peraturan daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 membebaskan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1

³⁵ Sari Yunita, *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Skripsi, 2010, hlm.17

³⁶ *Ibid*.

menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi antara sesama anak nagari, baik mengenai sako atau pusako.

1. Sako adalah gelar yang diturunkan dari mamak kepada anak kemenakannya menurut garis keturunan Ibu. "Disamping sako dikenal pula sansako (sansasko). Kalau sako diwarisi turun-temurun dari garis materilinal, sedangkan sanngsako tidak diwariskan seperti itu³⁷.

2. "Pusako adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu".³⁸ Pusako berupa sawah dan ladang, emas dan perak peninggalan dari orang tua nene-moyang di Minangkabau³⁹. Dan yang merupakan pusako, yaitu pusako tinggi dan pusako randah.

3. Proses penyelesaian sengketa

Dalam penyelesaian sengketa ada 2 (dua) proses/cara, yaitu:

a. Penyelesaian melalui proses non litigasi

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara *konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli*. Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

³⁷ Dalam Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau tahun 2002

³⁸ Dt.Parpatih Nan tuo et al, *Op.cit.*, hlm.68

³⁹ Idrus Hakimy, *Op.,cit*, hlm. 118

Alternatif Penyelesaian Sengketa , mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya :⁴⁰

Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (ascertable) Artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Meskipun demikian septabilitas tidak berarti- para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Mediasi menurut P.1.6 PerMa No.2 Tahun 2003 : Yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.

Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai “litigasi swasta” Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah “klausula arbitrase” di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau “Perjanjian Arbitrase” dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

b. Penyelesaian melalui proses litigasi

Proses penyelesaian litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial atau yang belum mampu merangkul kepentingan

⁴⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 39

bersama, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan kadang malah menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hukum ini juga disebut dengan hukum formal. "Hukum acara atau hukum formal adalah aturan yang dipakai dalam proses peradilan untuk mempertahankan, dan melaksanakan hukum material yang berlaku."⁴¹ Penyelesaian melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan.

Pembentukan Badan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusionalnya.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pengadilan yang berwenang dalam menangani Perkara tanah

⁴¹ Firman Hasan, *Op.cit.*, hlm.76

ulayat adalah Pengadilan Umum. Pengadilan Umum terdiri dari tiga tingkatan, yang wewenangnya masing-masing, yaitu⁴²;

1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri).
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara. PN sebagai Pengadilan tingkat pertama, secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama.
2. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)
Kekuasaan Pengadilan Tinggi menurut pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan PN dalam tingkat pertama.
3. Pengadilan Kasasi (Mahkamah Agung)
Pengadilan kasasi atau tingkat kasasi menurut pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004, dilakukan oleh MA.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan perkara akan diadili oleh seorang hakim. Di dalam suatu putusan pengadilan, harus memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim. Asas putusan tersebut antara lain⁴³:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- d. Diucapkan di muka umum.

C. Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Minangkabau

Dalam penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang turun sebagai asas dalam pergaulan bermasyarakat bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dalam pepatah adat yang

⁴² Yahya Harahap, Op., cit. hlm 190

⁴³ *Ibid.*

memutuskan "*bulek aia dek pambuluah, bulek katoi dek mufakat*" (sejenis saluran air yang terbuat dari bambu, dan bulat kata karena musyawarah atau mufakat). Dalam musyawarah mufakat ini, masyarakat Minangkabau akan selalu mengikat sertakan dan akan berpegang pada unsur-unsur yang ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengatur masyarakat. Unsur-unsur ini lebih dikenal dengan "*Tali Tigo Sapilin*" atau Tali Sapilin Tiga, yaitu meliputi unsur agama, adat dan undang-undang. Diatas ketiga unsur inilah dibangun nagari dan diatur masyarakat berdasarkan asas musyawarah mufakat dan prinsip saling menghormati dan menghargai. Hal ini terlihat dalam pepatah adat yang menyatakan:

Nan buto pahambuih lasuang, Nan Pakak palapeh badia, Nan lumpuah pengajuik ayam (orang buta untuk hidup meniup lesung yaitu (tempat menumbuk padi), orang tuli untuk melepas bedil atau meriam, orang lumpuh untuk menghalau ayam)⁴⁴.

Pepatah di atas melihatkan bahwa setiap manusia mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan. Menurut ajaran Minangkabau tidak ada manusia yang tidak berguna dan akan melakukan tugas sesuai kemampuannya. selain itu dalam menyelesaikan sengketa tanah, dilakukan dengan melihat asal usul harta itu. Selain itu juga disiasati dengan aturan-aturan:⁴⁵

- a. *harato jauah dicaliak-caliak* (harta itu sering dikunjungi).
- b. *harato dakek diulangi* (harta itu dikenal dan sering didatangi).
- c. *gadai dialiah-aliah* (gadai sering diganti pemegang gadai).
- d. *gadai dipadalam* (gadai yang diperbesar).
- e. gadai yang diperbaharui

⁴⁴ Firman Hasan, Op.cit., hlm.71-72

⁴⁵ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, hlm 14

2. Pengertian Dan Fungsi Lembaga Adat

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat masih berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Fungsi dari Lembaga Adat atau Kerapatan Adat Nagari yaitu berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari dalam bentuk putusan perdamaian.

Menurut Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa berfungsi sebagai panjaniah aia yang karuah (membersihkan air yang keruh), maluruihan banang nan kusuik (meluruskan benang yang kusut), maksudnya dalam menyelesaikan sengketa kerapatan adat nagari berfungsi untuk memperjelas duduk masalah dan meluruskan pokok masalah atau perselisihan yang ada⁴⁶.

Namun fungsi itu jadi tidak berguna karena kecenderungan masyarakat lebih suka membawa sengketa ke pengadilan dan aturan pemerintah yang kurang tegas mengenai fungsi dan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) kata Mulyadi. Lembaga adat tidak bermaksud untuk menguasai tanah ulayat tapi lebih kepada menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada dalam masyarakat hukum adat dalam wilayah dan kewenangan dari nagari. Ini ditujukan untuk menjaga keberadaan hukum adat dari nagari tersebut.

⁴⁶ Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Wawancara Dengan Ketua KAN Pauh V Padang, tgl 16 mei 2012

3. Peranan Lembaga Adat

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 dapat dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari dan didalamnya juga dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di nagari yang di akui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah *sako jo pusako*.

Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa, tidak serta merta menerima sengketa yang diajukan kepadanya, namun terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam lembaga adat di tingkat paruik, kaum, dan pasukuan, seperti kata pepatah kusuik disalaikan karuah di pajaniah (kusut diselesaikan dan keruh dijernihkan). Namun apabila para pihak, yang bersengketa tidak atau kurang merasa puas barulah naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V.

1. Objek Sengketa

Dalam ajaran adat Minangkabau mengenai tanah hanya bisa dibuktikan dengan batas-batas alami, seperti dengan adanya tumbuhan, jalan raya, jalan setapak, sungai dan lebih jelasnya nagari itu sendiri. Seandainya tanah itu sudah diolah oleh masyarakat dengan berbagai hal, biasanya diberi tanda berupa tanaman tua atau kayu yang ditanam kedalam tanah. Batas-batas alami ini terungkap dalam pepatah adat berikut ini;

"Sawah nan balantak, Ladang bamintalak, Padang balikundi, Bukik Bakarakaratau".

Maksud dari Pepatah ini yaitu, untuk membatasi sawah, ada pematang yang terdiri dari batu tanam, untuk membatasi ladang ada mintalak, yang terdiri dari batu, batang pudding, berupa tanaman yang mudah hidup dan sulit punah. Batas-batas yang ditanam ini ada dengan kesepakatan masyarakat dan berlaku bagi anak serta cucu-cucunya.

Tanah yang disengketakan dalam skripsi yang dibahas oleh penulis ini, semuanya berada di Kelurahan Binuang Kp.dalam Kecamatan Pauh (Nagari Pauh V) Kota Padang. Untuk lebih rinci berikut ini adalah lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu:

Sebelah Barat berbatasan dengan Parak si Samat suku Melayu

Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar Gadang

Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air Cupak

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Kampuang Dalam di
baliknya dengan kawan tanah ini.

Secara keseluruhan tanah yang dipersengketakan adalah 1 (satu) tumpak sawah dengan nama sawah jirat. Dimana diatas objek perkara terdapat Pusara/Pakuburan, disana telah berdiri sebuah Lesung/Lasuang, serta Mushalla, dua buah rumah semi permanen masing-masing luasnya lebih kurang 300 meter bujursangkar dan juga beberapa piring sawah telah menjadi kolam-kolam (Empang), selebihnya tetap menjadi sawah-sawah.

2. Subjek-Subjek Dalam Sengketa

Seorang warga masyarakat yang bernama Pimping bersuku Tanjuang Nagari Pauh V ,sebagai pewaris yang telah meninggal pada tahun 1926, merupakan pemilik semua harta pusaka yang diuraikan diatas yang menjadi sengketa oleh para pihak yang berperkara dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini. Dimana para pihaknya sebagai berikut;

a. Penggugat

Dalam sengketa tanah ulayat ini para penggugat bersuku Tanjuang yang mana mereka merupakan keturunan dari Pik Biduak. Merupakan saudara perempuan kandung dari Mene alias Pimping (pewaris) mereka juga masih mempunyai saudara laki-laki yang lain yaitu; H.Rusit, Masud, H.Moh.Tahir, dan Nambi. Mereka semua merupakan anak dari pasangan suami istri Gaek Karo (laki-laki) dan Iyek Karo (perempuan). Dalam hal

ini yang berperkara yaitu Usman Hasan (Mama Kepala Waris dalam kaumnya) cucu dari Pik Biduak beserta kemenakan-kemenakannya yang lain, Zainul Abidin dan Ir.Yosefrida.

b. Tergugat A

Almarhum Pimping dan Pik Andai adalah kakek dan nenek dari tergugat-tergugat A merupakan sepasang suami istri. Yang mana yang berperkara dalam perkara ini yaitu; Irman (Mamak Kepala Waris dalam kaumnya) merupakan anak dari Dauna (perempuan) yang juga sebagai tergugat. Dan yang menjadi tergugat selanjutnya adalah Rimbun (perempuan) saudara dari Dauna mereka adalah cucu dari pasangan suami istri tersebut yang bersuku Koto.

c. Tergugat B

Darwas Idris yang merupakan mamak kepala waris dari kaumnya merupakan kamanakan dari H.Noni yang bersuku Tanjuang. Hubungan mereka dengan Mene alias Pimping menurut keluarga Darwas Idris mereka merupakan balahan dari kaum Mene alias Pimping atau sajurai.

3. Duduk Perkara

Dalam ajaran adat Minangkabau mengenai pewisan, memakai pewarisan dengan cara Materilinal (menurut garis keturunan ibu). Perempuan tertua dikeluarganya menguasai harta pusaka dan selanjutnya akan diwarisi kepada anak-anak perempuannya dan begitu seterusnya. Sedangkan Laki-laki hanya sebagai pengatur dan mengawasi dari harta pusaka, bukan pemilik dari harta pusaka tersebut. Namun apabila suatu

keluarga itu punah (tidak mempunyai keturunan) maka harta pusaka akan diwarisi oleh balahannya atau kaum terdekat bagi mereka. Dimana itu dapat dilihat dari sistem pewarisan Minangkabau yang menjadi ahli waris utama adalah yang mempunyai hubungan batali darah, dan apabila orang batali darah tidak ada, maka yang menjadi ahli warisnya adalah berturut-turut "sajari, sajangka, saheto", yaitu tergantung jauh dekatnya pewaris dengan warisnya.

Orang pertama yang menjadi waris yaitu orang yang terdekat dengan pewarisnya, dan begitu selanjutnya secara berturut-turut. Dengan prinsip waris itu secara tutup-menutupi, apabila waris sajari masih ada maka tertutuplah waris sajangka, dan begitu seterusnya bagi waris yang lain. Pewaris yang disebut diatas namanya adalah "waris yang patut buliah", dimana haknya akan timbul apabila orang yang punah tersebut tidak menunjuk warisnya. Dalam perkara ini Mene alias Pimping (pewaris) yang bersuku Tanjuang yang mempunyai semua harta pusaka yang terdapat dalam perkara ini. Penyebab dari munculnya sengketa menurut para pihak sebagai berikut;

a. Versi Usman Hasan (Mamak Kepala Waris Penggugat)

Pada tahun 1916 andung dari Usman Hasan bernama Pik Biduak yang merupakan kakak perempuan kandung dari Pimping pindah dari Kampung Dalam Pauh V ke Padang Besi karena mengikuti suaminya dan sampai hayatnya menetap dan berketurunan disana dan berkubur di

Padang Besi. Mereka berdua merupakan anak dari Pik Karo (Perempuan) dan Gaek Karo (Laki-Laki).

Pimping adalah merupakan Angku dari Usman Hasan. Semenjak Andung Usman Hasan (Pik Biduak) meninggal dunia pada tahun 1926 semua harta pusaka tinggi kaum mereka semuanya baik itu sawah maupun tanah gurun di kuasai oleh adiknya atau angku Usman Hasan yang bernama Mene alias Pimping. Dan pada saat sekarang ini semua harta pusaka tersebut di kuasai oleh anak-anak Mene alias Pimping berserta keturunan-keturunannya. Menurut keluarga Usman Hasan keluarga H.Noni yang saat ini pewarisnya Darwas Idris (tergugat b) memberikan hibah objek perkara kepada anak-anak Mene alias Pimping dan sebagian harta pusaka Mene alias Pimping juga di kuasai oleh H.Noni. Karena anak-anak Mene alias Pimping menganggap H.Noni sebagai bakonya . Di lihat sistem pewarisan adat Minangkabau terhadap pusaka tinggi di warisi oleh keturunan perempuan dan tidak dapat dimiliki oleh pihak laki-laki. Laki-laki cuma pengelola dari harta pusaka tinggi tersebut⁴⁷. Namun pemilik akan pusaka tersebut adalah pihak perempuan dan keturunannya. Di Minangkabau sendiri memakai sistem pewarisan Meterilinal yaitu menurut garis keturunan Ibu. Hibah dapat dilakukan apabila semua keluarga dalam kaum menyetujui hibah tersebut atau apabila kaum itu sudah punah pemberian hibah tersebut harus disaksikan oleh orang lain (penghulu/pemungka adat setempat).

⁴⁷ Zainal Abidin, Wawancara Dengan Penggugat, tgl 3 Mei 2012

b. Versi Irman (Mamak Kepala Waris Tergugat A)

Almarhum Pimping dan Pik Andai adalah kakek dan Nenek dari tergugat-tergugat A merupakan suami istri. Menurut Irman Kakeknya (Alm.Pimping) tidak mempunyai saudara perempuan seperti yang diungkapkan oleh pihak Usman Hasan. Mengenai masalah harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh Pimping merupakan milik kaumnya dari Usman Hasan itu tidak benar. Yang benar harta yang dikuasai oleh Pimping merupakan harta pencahariannya sendiri dan bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Usman Hasan. Yang merupakan tanah garapan pribadi dari kakek dan neneknya.

Pada tahun 1925 lebih kurang 1 (satu) tahun sebelum almarhum Pimping meninggal dunia Pimping mengibahkan dengan nama testamen hartanya kepada anaknya yang bernama Rahim alias Bangsat (beserta saudara perempuannya). Hubungan tergugat A dengan Rahim adalah Rahim alias Bangsat angku bagi Tergugat A dan Mamak dari Munyar Oce (alm), sedangkan Munyar Oce merupakan Mamak bagi Tergugat A yang meninggal pada tahun 1996. Dan baru lah harta itu sampai pada Tergugat A sampai sekarang. Dan tidak benar juga bahwa H.Noni mengibahkan harta pusaka tersebut kepada mereka⁴⁸.

c. Versi Darwas Idris (Tergugat B)

Darwan Idris menyatakan bahwa Mene alias Pimping tidak mempunyai saudara perempuan. Harta yang dikuasainya merupakan harta

⁴⁸ Irman, Wawancara Dengan Tergugat A, tgl 16 April 2012

pusaka tinggi kaumnya. Dimana setelah Pimping alias Mene meninggal dunia jurai pimping tidak ada lagi karena pimping merupakan anak tunggal dari Ibunya Pik Lua dan saudara-saudara perempuannya, anak dari Aciak Ciro semuanya sudah meninggal dunia, dengan sebab itu maka harta pusaka tinggi tersebut menurut cara peralihan waris di Minangkabau maka harta pusaka tinggi tersebut jatuh dan diwarisi oleh jurai Tergugat B yang bermula dari Pik Intan seterusnya diwarisi oleh Uya (perempuan). Seterusnya oleh Jawaher dan H. Noni serta Masni sekarang turun kepada Tergugat B selaku Mamak Kepala Waris dari kaumnya. Mereka merupakan suatu keluarga dan tergugat B merupakan penerus ranji dalam keturunan kaumnya.

B. Proses Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V.

Dalam ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam suatu kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kapalo waris dalam suatu kaum. Namun apabila keputusannya dirasakan tidak memuaskan maka akan bisa dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) di daerah yang bersangkutan.

Pada Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 dan sekarang di ganti dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2001 tentang Poko-Pokok Pemerintahan Nagari, dan didalamnya menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di nagari yang di akui oleh

pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah "*sako jo pusako*".

Bukan itu saja pada saat sekarang ini juga sudah dikeluarkan Perda yang lebih jelas-jelas mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa tanah ulayat. Terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dalam pasal 12 butir 1, menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat dari nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naik batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ini merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Agraria/ BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam penyelesaian konflik (sengketa) ada dua cara. Pertama, non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa di Minangkabau mempunyai beberapa lembaga yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini. Dalam penyelesaian sengketa harus melibatkan unsur-unsur adat, seperti tokoh-tokoh (pemungka adat) dalam suatu lembaga adat. Untuk sengketa tanah ulayat ini, dimana sengketa terjadi antar dua suku dalam suatu nagari maka penyelesaiannya bisa diselesaikan di lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kedua, litigasi yaitu penyelesaian perkara di dalam sidang pengadilan.

Namun dalam penyelesaian perkara ini, tidak adanya penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu. Menurut Irman

(kepala waris) tergugat A. Kenapa penyelesaian sengketa ini tidak diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena dalam penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak adanya suatu putusan yang tegas dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusannya.

Ini di pertegas oleh pernyataan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, menyatakan bahwa untuk sengketa yang terjadi antara dua suku ini tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu. Menurut Ketua KAN Pauh V itu, seharusnya dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan adat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di KAN⁴⁹. Karena KAN lebih mengetahui mengenai sengketa dan pokok sengketa yang terjadi di nagari mereka. Sehingga dapat memberi masukan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ini.

1. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kota Padang

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara, PN sebagai Pengadilan tingkat pertama, secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama⁵⁰. Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan para pihak selalu menginginkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk mengambil keputusan hakim harus melihat asas-asas yang akan diterapkan, agar putusan itu dalam putusannya tidak

⁴⁹ Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Wawancara Dengan Ketua KAN Pauh V Padang, tgl 16 Mei 2012

⁵⁰ Yahya Harahap, Op., cit. hlm 190

mengandung cacat. Mengenai asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 189

*R.Bg./178 H.I.R.*⁵¹

1. Karena jabatannya, hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan.
2. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

Keluarga Usman Hasan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Padang, tertanggal 3 Mei 2000 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 8 Mei 2000 Kota Padang dengan No. 31/Pdt.G/2000/Pn. Pdg. Gugatan dilakukan terhadap keluarga Irman dan keluarga Darwas Idris mereka disebut telah menguasai harta pusaka tinggi kaum mereka secara sewenang-wenang.

a.Duduk Perkara

Gugatan

Adapun yang menjadi gugatan dari penggugat sebagai berikut, yang menjadi objek sengketa yaitu satu tumpak sawah jirat yang batas-batasnya telah disebutkan di atas. Dimana diatas objek perkara terdapat pusara/pakuburan nenek-nenek penggugat dan angku penggugat Pik Karo, Gaek Karo, Pimping dan diikuti oleh anak-anak Pimping. Bahwa mereka mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah sawah dan tanah gurun yang terletak di kelurahan kampung dalam kecamatan pauh kota padang yang di warisi dari ninik-ninik/ angku penggugat yang bernama Pik Karo (Pr) dan Gaek Karo (Lk) almarhum yang beradik

⁵¹ K. Wantjik Saleh. S.H, Hukum Acara Perdata, ghalia indonesia, Jakarta timur, 1981., hlm 3

kakak dan terus kepada angku penggugat yang bernama Mene alias Pimping dan saudara perempuannya nenek penggugat bernama Pik Biduak dan terakhir kepada penggugat-penggugat ini di pertegas dengan melampirkan alat bukti P.I berupa ranji/silsilah keluargaNyani suku Tanjuang, tertanggal 8 maret 1976.

Pada tahun 1916 Andung penggugat Pik Biduak pindah dari kampung dalam ke padang besi untuk mengikuti suaminya dan samapi pada akhir hayatnya menetap dan berketurunan disana serta berkubur di padang besi tersebut. Setelah meninggalnya Andung penggugat pada tahun 1926 di padang besi, seluruh harta pusaka tinggi kaum penggugat dikuasai oleh angku penggugat Mene alias Pimping. Semasa hidupnya keluarga tersebut tanah pusaka tinggi tersebut banya digadaikan dan objek perkara pada tahun 1891 kepada si Rapah. Mengenai gadai dilampirkan alat bukti yang diberi tanda P.III dan P.IV Setelah meninggalnya angku penggugat Mene alias Pimping dimana hartanya banyak di ambil oleh orang yang mengaku sebagai ahli warisnya diantaranya H.Noni yang warisnya sekarang tergugat B, karena pada waktu itu H.Noni merupakan orang yang disegani sebagai kaki tangan Belanda (NIPIS). Kerena itu anak-anak Mene alias Pimping mambakolah mereka kepada H.Noni yang bersuku Tanjuang. H.Noni mengibahkan objek perkara yang di sebut tanah jirat kepada anak-anak yang saat ini warisnya Tergugat A keluarga Irman Mene alias Pimpin. Mereka merupakan bako dan anak pisang. Degan sebab itu penggugat

meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan penggugat-penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Mene alias Pimping dan menghukum Keluarga Irman Untuk mengembalikan objek perkara serta menyatakan perbuatan H.Noni merupakan perbuatan melawan hukum.

Eksepsi Tergugat A

"Eksepsi merupakan bantahan atau tanggapan dari pada tergugat. Menurut aturan hukum apabila eksepsi diterima maka proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif⁵².

Bantahan dari keluarga Irman (tergugat A), bahwa tidak benar Kakek mereka Mene alias Pimping mempunyai saudara kandung perempuan yaitu Pik Biduak. Mengenai objek perkara itu merupakan harta pencaharian dari kakek tergugat A yang dinamakan dengan harta susuk bukan merupakan harta pusaka tinggi dari kaum penggugat. Dan tidak benar keluarga Irman memperoleh objek perkara dari H.Noni, semua itu diperoleh dari hibah kakek mereka Mene alias Pimping kepada anaknya Rahim alias Bangsat beserta saudara-saudaranya yang warisnya keluarga Irman, dapat di lihat alat bukti T.A.1.2/V yaitu surat wasiat (testamen) no 5 tanggal 1 Agustus 1925. Objek sengketa ini juga pernah menjadi objek perkara Rekonpensi dalam perkara No.140/Pdt/G/1996/PN.Pdg. yang sebagai pengugat adalah Tergugat B yang mana menjadi alat bukti T.A.1.2/I. Dimana dalam semua putusan pengadilan dalam setiap tingkatannya menolak gugatan seluruhnya.

⁵² Yahya Harahap, Op.,cit, hlm 419

Gugatan Rekonvensi Tergugat B

Pengertian gugatan rekonvensi didalam Pasal 244 Rv, gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam proses perkara yang sedang berjalan. Makna ini sama dengan yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 HIR.

Dalam gugatan ini berisi, bahwa objek sengketa yang batas-batasnya disebutkan di atas, bahwa harta sengketa tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum mereka yang diwarisi oleh nenek penggugat rekonvensi Kasah, Loteng dan Tukang, terakhir dikuasai oleh angku penggugat rekonvensi yaitu Mene alias Pimping. Setelah meninggalnya Mene alias Pimping jurai Mene alias Pimping tidak ada lagi karena Mene alias Pimping adalah anak tunggal dari Ibunya Pik Lua dan saudara-saudara sepupunya, anak dari Aciak Karo semua telah meninggal dunia dan jatuh kepada jurai penggugat yang bermula dari Pik Intan dan seterusnya diwarisi oleh Uya (Pr) seterusnya Oleh Jawaher dan H.Noni serta oleh Masni dan sekarang turun kepada tergugat Bselaku mamak kepala waris dalam kaum dapat dilihat dari alat bukti yang dilampirkan diberi tanda T.B/I surat ranji/silsilah keluarga. Semasa hidupnya Mene alias pimping telah memisahkan harta tersebut yang sebagian telah dihibahkan kepada anaknya hasil perkawinan dengan Pik Andai yaitu warisnya Tergugat A. Maka karena itu penggugat rekonvensi meminati kepada majelis hakim untuk mengembalikannya objek perkara kepada penggugat rekonvensi karena merupakan pusaka tinggi kaumnya.

b.Pendapat Hakim

Dalam perkara ini yang disengketakan bukanlah mengenai status keperdataan seseorang yang berhak menjadi mamak kepala waris suatu kaum melainkan status kepemilikan tanah. Mengenai objek perkara yang telah dijelaskan batas-batasnya oleh penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Padang di hadirinya para pihak pada pokoknya sudah benar. Perkara ini bukanlah *Nebis in idem* dan hal itu dapat diajukan kembali karena pokok perkaranya belum diperiksa dan diputus. Masalah tidak digugatnya instansi yang terkait masalah pengeluaran sertifikat tanah itu adalah sepenuhnya hak perdata dari pihak penggugat.

c.Pertimbangan Hukum

Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.⁵³ Menimbang bukti Penggugat P.I adalah Ranji/silsilah keturunan dari Penggugat yang dibuat oleh mamak kepala warisnya terdahulu bernama Maurin pada tanggal 8 Maret 1976 dan ranji/silsilah keturunan dari kaum Tergugat B yang dibuat oleh Mamak dari H.Noni pada tahun Jepang yaitu tahun 2606 atau tahun 1942 masehi, diperbaharui pada tanggal 1 Maret 1996 oleh mamak kepala warisnya yang terakhir yaitu Darwas Idris (tergugat B). Bahwa tidak ada satupun saksi-saksi baik dari pihak Penggugat, Tergugat A dan Tergugat B pernah melihat si Pimping dan

⁵³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 91

mengetahui jumlah saudara serta ibu kandungnya. Bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang menjelaskan keterkaitan hubungan penggugat-penggugat dengan si Pimping dan Pik Biduak apakah seharga pusaka dan sekaum. Menimbang dari ranji/silsilah keturunan pihak Penggugat-penggugat dan Tergugat B, maka majelis hakim memakai 2 indikator yaitu; banyaknya keturunan (generasi) dan masa pembuatan ranji. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Darwas Idris (tergugat B) sekaum dan seharga dengan si Pimping. Dari bukti yang diajukan tergugat A salinan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, maka perkara berupa satu tumpak sawah jirat tersebut bukan harta pusaka tinggi kaumnya si Pimping. Dalam perkara ini hakim memakai aturan adat untuk mendekati masalah.

d.Amar Putusan

"Hakim dalam setiap memutus suatu perkara di Pengadilan selalu sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku menurut hakim Fahmiron, SH., M.Hum hakim di Pengadilan Negeri Padang⁵⁴. Asas putusan tersebut antara lain:⁵⁵

1.Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, dan Doktrin hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu

⁵⁴ Fahmiron, Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Tgl 18 April 2012

⁵⁵ Yahya Harahap, Op.,cit. hlm 797-806.

yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 189 RBG dan Pasal 178 ayat (2) HIR “hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”. Jadi semua dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan yang diajukan penggugat harus diputus dan diadili. Apabila putusan hanya mempertimbangkan gugatan konvensi, padahal tergugat mengajukan gugatan rekovens, berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan sebagaimana diperingatkan dalam Putusan MA No. 104 K/Sip/1968.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Hal ini digariskan dalam pasal 189 ayat (3) RBG, pasal 178 (3) HIR “hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat”.

4. Diucapkan di muka umum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo Pasal 13 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Dalam literatur disebut *the open justice principle*, tujuan utamanya untuk menjamin proses peradilan agar terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan.

Dalam pemeriksaan seorang saksi juga diatur oleh peraturan sebab saksi merupakan alat bukti yang penting dalam perkara perdata. Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 RBG, 1907 BW). Tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat dibuktikan kebenaran persaksiannya.⁵⁶

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm 169

Setelah melalui persidangan dengan mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berpekara, telah memeriksa di lokasi objek perkara, dan dokumen pendukung lainnya seperti testamen (surat hibah), ranji atau silsilah keluarga, surat gadai dan salinan putusan perkara rekonvensi. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Padang memutuskan menolak gugatan penggugat-penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat-penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.264.000,-(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Untuk gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Dilihat dari keterangan saksi-saksi tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan pewaris keputusan pengadilan negeri ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang

Kekuasaan Pengadilan Tinggi menurut pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan PN dalam tingkat pertama. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan PT sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan PN apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berpekara.

Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Padang, yang telah menolak gugatan dari keluarga Usman Hasan dan menghukum membayar ongkos perkara. Maka keluarga Usman Hasan mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, mengajukan ke Pengadilan Tinggi

Provinsi Sumatera Barat. Menurut keluarga Usman Hasan *judex factie* dianggap telah salah dalam memutus perkara dan memeriksa perkara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Risalah Pembanding

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, dianggap telah salah dalam menerapkan hukum adat, karena dalam putusannya telah menolak gugatan keluarga Usman Hasan seluruhnya, berarti Pengadilan Negeri Padang membenarkan bahwa harta pusaka yang di sengkatakan adalah harta pencaharian Mene alias Pimping dan bukan tanah pusaka tinggi kaumnya. Dan juga membenarkan bahwa H. Noni merupakan balahan Mene alias Pimping. Di lihat dalam hukum adat orang yang babalahan mempunyai hubungan darah, namun dalam kenyataannya mereka tidak pernah tinggal serumah gadang dan tidak sepandam pakuburan.

"Dalam sistem waris Minangkabau jika sorang ibu yang meninggal maka ahli warisnya adalah pertama anaknya kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini, disebut warih nan dakek (ahli waris nan dekat)⁵⁷. Namun jika suatu kaum tersbut sudah punah baru lah beralih ke balahannya, tetapi apabila di hibahkan ke orang lain maka itu diperbolehkan dengan itu tertutuplah balahannya, di sebut "warih dakek nan kamauleh", namun itu harus seisin seluruh keluarga kaumnya dalam musyawarah. "Itu dapat dilihat dalam fatwa adat yang menyatakan "Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat"(Bulat air karena pambuluh

⁵⁷ Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.89.

(saluran air dari bambu), bulat kata karena mufakat (musyawarah)⁵⁸. Kalau tidak ada hal ini maka, peralihan waris tersebut tidak di benarkan dalam adat Minangkabau.

b. Risalah Terbanding

Dalam risalah banding pihak keluarga Irman masih menyatakan bahwa Pimping tidak mempunyai saudara perempuan kandung, harta pusaka tersbut bukan lah harta pusaka tinggi Pimping melainkan harta pencahariannya, mereka memperoleh harta pusaka tersaebut dari hibah Pimping kepada mamaknya Rahim alias Bangsat dan saudara-saudaranya yaitu anak pimping dengan surat hibah setahun sebelum meninggalnya Pimping. Sehingga mereka merasa berhak atas tanah pusaka tersebut. Risalah ini hampir sama isinya dengan eksepsi yang di dikeluarkan oleh tergugat sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Padang.

c. Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Tingi berpendapat bahwa saksi –saksi terutama Aziz Rajo Alam , Rosna, Usman Omon dan Zarkani menerangkan bahwa H. Noni dan Pimping tidak sekaumhanya hubungan satu suku saja.dan dari kesaksian mereka bahwa antara penggugat-penggugat dengan Mene alias Pimping satu kaum, sebab Pik Biduak adalah saudara perempuan kadung Mene alias Pimping itu terlihat dri alat bukti saksi diatas. Masalah Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 140/Pdt.G/ 1996 PN.Pdg

⁵⁸ Firman Hasan, *Op. cit.*, hlm.71

(T.A.1.2/I), jo putusan pengadilan Tinggi Padang (T.A.1.2/II) harus dikesampingkan karena subjek dan objeknya berbeda.

d. Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam putusannya Nomor. 185/PDT/2000/PT.PDG. setelah mempertibangkan kedua belah pihak dan memeriksa berkas-berkas baik dalam berkas acara di Pengadilan Negeri Padang, serta berkas-berkas lainnya (alat-alat bukti) yang pada pokoknya berisi adalah mengabulkan gugatan penggugat/ pembeding untuk sebahagian, menyatakan pembeding sebagai mamak kepala warisnya, menyatakan penbanding adalah waris dari Mene alias Pimping dan Pik Biduak yang berhak mewarisi harta pusaka Pimping dan Pik Biduak termasuk objek perkara, menyatakan tindakan H. Noni bersama Tergugat B/ Terbanding menguasai harta pusaka tinggi dan memberikan objek sengketa ke Tergugat A merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat A/Terbanding untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat-penggugat/Pembeding dalam keadaan kosong agar Penggugat-penggugat/ Pembeding bebas menguasainya dan kalau engkar dengan bantuan polisi. Berarti Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat telah memenangkan gugatan keluarga Usman Hasan dalam sengketa ini.

3. Penyelesaian di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta

Pengadilan kasasi atau tingkat kasasi menurut pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004, dilakukan oleh MA. Yang berbunyi terhadap keputusan pengadilan

tingkat banding, dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan⁵⁹.

Pengadilan tingkat kasasi (MA) tentang pemeriksaan tidak memeriksa fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Yang diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah memeriksa apakah peraturan hukum tidak atau salah diterapkan atau tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituruti oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah mengabulkan sebahagian dari gugatan keluarga Usman Hasan, dengan putusan tersebut keluarga Irman dan Darwas Idris merasa sangat dirugikan dan takut akan kehilangan harta pusaka, karena harus mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan menyatakan bahwa perbuatan H. Noni yang menguasai tanah pusaka tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Maka kedua keluarga tersebut melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Risalah Pemohon

Keluarga Irman dan Darwas Idris merasa tidak terima dan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Februari 2001 Nomor. 185/Pdt/2000/Pt. Pdg, Putusana Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2000 Nomor. 31/Pdt.G/2000/Pn. Pdg, karena itu melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵⁹ Yahya Harahap, Op., cit, hlm 191

Dalam hal ini keluarga Irman dalam permohonan kasasi menyampaikan risalah yang isinya hampir sama dengan eksepsi sebagai tergugat dahulu bahwa Mene alias Pimping tidak mempunyai saudara perempuan kandung melainkan merupakan anak tunggal dari keturunan Pik Andai dan objek perkara yang kabur atau tidak jelas, serta objek perkara ini pada tahun 1996 telah pernah disengketakan dari Pengadilan tingkat pertama sampai Pengadilan Mahkamah Agung dan putusnya dimenangi oleh Keluarga Irman . Begitu juga menurut keluarga Darwas Idris, Mene alias Pimping tidak mempunyai kakak perempuan dan tidak benar hibah diberikan oleh H.Noni kepada anak-anak Pimping, seterusnya sesuai dengan eksepsi pemohon sebagai tergugat dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang.

b. Pertimbangan Hukum

Ditinjau dari berita acara yang didalamnya terdapat alat bukti yang pernah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yaitu Ranji atau silsilah keluarga dengan indikator yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang mendekati kebenaran adalah ranji atau silsilah dari keluarga Darwas Idris, dengan memenuhi indikator dalam penentuan keabsahan dari suatu ranji atau silsilah suatu kaum. Dalam hal pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri sudah tepat.

c. Amar Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia , pada tanggal 22 Februari 2006 memutus perkara isi pokoknya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mengabulkan permohonan kasasi dari

keluarga Irman dan keluarga Darwas Idris dan membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat Nomor. 185/Pdt/2000/Pt. Pdg, tanggal 20 Februari 2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 31/Pdt.G/2000/Pn.Pdg, tanggal 7 Agustus 2000. Dengan ini perkara ini dimenangkan oleh para pihak tergugat dan tidak ada eksekusi terhadap objek perkara. Dalam hal ini ditinjau dari aturan adat Minangkabau ini sudah sesuai dengan pembuktian yang ada dalam aturannya.

3. Kendala-kendala Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V

Dalam setiap penyelesaian suatu permasalahan selalu memunculkan suatu kendala-kendala atau hambatan dalam hal penyelesaiannya baik dalam mengambil keputusan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan suatu masalah. Tetapi kendala-kendala itu mempunyai dapat berbeda dari keadaan-keadaan atau kedudukan para pihak didalamnya.

Bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri Padang, yang disampaikan oleh Fahmiron, S.H, M.Hum "bagi seorang hakim dalam penyelesaian suatu sengketa dia hanya sebagai majelis yang memeriksa perkara sesuai dengan asas hukum acara perdata, apabila telah melalui semua tahap maka hakim memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat masalah dalam penyelesaiannya.

Namun ada kendala-kendala lain, dan di kotakan menjadi dua faktor oleh penulis:

a. Faktor Internal

Faktor internal susahnya penyelesaian sengketa tanah ulayat ini datang dari para pihak sendiri yang tidak mau melakukan penyelesaian secara musyawarah (perdamaian) secara kekeluargaan atau melalui Kerapatan Adat Nagari dan lebih memilih melalui jalur pengadilan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang membuat terjadinya kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto ini, banyaknya intimidasi para pihak dan ikut campurnya masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Yang membuat para pihak yang merasa mempunyai hak akan objek perkara dan banyaknya subjek dalam objek perkara ini. Akibat dari banyaknya subjek (orang) yang menggugat objek perkara ini, sehingga makin banyak persidangan di pengadilan yang mengakibatkan makin tingginya biaya yang dikeluarkan, dan membuat itu menjadi sebuah kendala.

Selain itu faktor lain yang membuat susahnya penyelesaian, batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Dan tidak adanya saksi-saksi dalam masyarakat disana yang mengetahui mengenai asal usul dari keberadaan objek perkara. Untuk mengatasi kendala-kendala ini harus adanya pemberian pengertian yang sangat mendalam kepada para pihak agar mengerti dampak dari sebuah sengketa. Dalam hal ini penyelesaian melalui pengadilan akan merugikan kedua belah pihak dan memunculkan suatu keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (musyawarah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penyebab dari timbulnya sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjuang dengan Suku Koto di Pauh V ini, disebabkan oleh kurang jelas atau kaburnya ranji atau silsilah keluarga dari pewaris yaitu Mene alias Pimping dan pemberian hibah yang diberikan pewaris kepada Rahim alias Bangsat beserta saudaranya yang lain yang merupakan anak dari Mene alias Pimping. Disamping itu mulai bergesernya pola kehidupan masyarakat yang lebih mementingkan keindividuan. Dimana keluarga yang menyatakan sebagai kaum dari Mene alias Pimping tidak mengakui tentang hibah yang diberikan kepada keluarga dari anak-anak Mene alias Pimping dan menuntut keluarga Darwas Idris yang mengaku sebagai balahan dari kaum Mene alias Pimping. Para tergugat dimintak untuk mengembalikan semua harta pusaka Mene alias Pimping yang dikuasainya selama ini.
2. Proses penyelesaian dari sengketa tanah ulayat ini, melalui lembaga pengadilan tanpa melalui penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Kota Padang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat, karena hakim tidak melihat kebenaran dari ranji penggugat dengan memakai indikator pembuktian

banyaknya keturunan, lama waktu pembuatan. Dan hakim tidak melihat kebenaran dari keturunan penggugat karena saksi-saksi tidak pernah melihat pewaris (Mene alias Pimping) dan tidak mengetahui jumlah saudara Mene alias Pimping itu sendiri sehingga hakim memberikan putusan seperti itu. Pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sebagian gugatan pemohon banding (penggugat) dikabulkan sebahagian, mereka berpendapat bahwa dari beberapa pernyataan saksi dan alat bukti ada keterkaitan antara status dari ranji atau silsilah keluarga penggugat dengan pewaris (Mene alias Rahim) sehingga gugatannya dapat kabulkan sebahagian. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) itu sudah benar, kerena hakim di MA (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa pengadilan di tempat perkara itu terjadi lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Dan indikator pembuktian yang dipakai oleh pengadilan tingkat pertama dalam memutus itu sudah tepat.

3. Dalam penyelesaian sengketa ini mempunyai beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya, yaitu faktor internal para pihak tidak mau melakukan penyelesaian secara musyawarah di Kerapatan Adat Nagari, dan faktor eksternal banyaknya intimidasi masyarakat terhadap sengketa ini, serta banyaknya subjek dalam sengketa ini yang merasa berhak, sehingga para pihak sulit menyelesaikannya.

B. Saran

1. Terjadinya sengketa dalam suatu nagari yang melibatkan warga masyarakatnya yang lebih mengetahui tentang duduk masalahnya adalah kepala atau pemimpin-pemimpin nagari tersebut yang terdapat dalam lembaga adat, dan pemerintah harus memberi wewenang yang lebih tinggi kepada nagari dalam penyelesaian suatu masalah dalam nagarnya untuk menjaga keberadaan adat Minangkabau, seperti pepatah adat "adat ndak lapuak dek hujan ndak lakang dek paneh" maksudnya adat tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan kering karena panas.
2. Harus adanya aturan yang tegas agar penyelesaian suatu sengketa tanah ulayat harus di selesaikan terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari penyelesaian di tempat tersebut terlebih dahulu bisa dijadikan tempat perdamaian dari sengketa ini kalau dibawa kepengadilan. Apabila tidak adanya tahapan itu terlebih dahulu dengan bukti rekomendasi dari Kerapatan Adat nagari (KAN) maka sengketa tidak dapat di bawa ke Pengadilan.
3. Harus adanya pemberian kesadaran kepada masyarakat adat Minangkabau mengenai tanah, hibah dan perjanjian lainnya agar di buat dengan akta otentik, agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Bagi Notaris yang bertugas di Minangkabau ini harus lebih teliti dalam memberikan legal suatu perbuatan hukum tersebut mengenai hal tanah adat di Minangkabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Dt.Parpatih Nan tuo et al, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kiabullah, Pedoman Hidup Bernagari, Sako Batuah, Padang.
- Firman Hasan. 1988. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Hadikusumo, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- 1997. *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Idrus Hakimy. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kurniawarman. 2006 *Ganggam Bauntuk Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Hak Tanah Di Sumatera Barat*. PressPadang: Andalas University.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Magaretha Pustaka
- Narullah, Fadillah Sabri, dan Yusrida. 2002. *Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Ridwan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Sayuti Thalib. 1985. *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bandung: Bina Aksara.
- Soekanto Soejono dan Ratih Lestari. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta: Gunung Agung,

Soekanto Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta .

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Van dijk. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia (terjemahan A. Soehardi)*. Bandung: Sumur Bandung.

Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Hukum Acara Perdata, Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ Herziene Indonesische Reglement
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 jo Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Jurnal:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Tanah Ulayat dan Budaya Padi Minangkabau, Yayasan Padi Indonesia, Jakarta, 2004.
2. Sari Yunita, *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Skripsi, 2010.
3. Titi Dianti Putri, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Pada Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Sumatera Barat. 2002.

Website:

Syafan Akbar, eprints.undip.ac.id/23928/1/Sayafan-Akbar.Pdf, Tgl 12 Februari 2012

Santos, <http://www.Santoslolawang.com/hukum/penerepan conditio sine qua non>, Tgl 17 Mei 2012



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 07. 682 /Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Surat dari PD I Fakultas Hukum UNAND

Nomor : 444/UN.16.4/PP-2012

tanggal 29 Maret 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 09 April 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: TRYO NELYATA
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 28 Juni 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jl. Kp. Dalam No. 26 Kec. Pauh
Maksud Penelitian	: Pengambilan Data
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Dengan Suku Koto di Nagari Pauh V Kota Padang (No. 31/Pdt.G/2000/Pn.Pdg)
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: Pengadilan Negeri Klas IA Padang, KAN Pauh V
Waktu Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 09 April 2012

An KEPALA

KANTOR KESATUAN BANGSA



JHONISMED. SH

NIP. 19630227 198509 1 002

Diteruskan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang
2. Kepala KAN Pauh V
3. PD I, Fakultas Hukum Unand
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 444 /UN.16.4/PP-2012

Lamp. :

Perihal : Tugas Survey/penelitian

Padang, 29 Maret 2012

Kepada Yth :

Bapak. Walikota Padang

C.q. Kabid.Kesbang dan Politik

di -

PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Tryo Nelyata
Nomor BP	: 0810112097
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Kp. Dalam Pauh Padang
Pembimbing I	: Bachtiar Abna, SH.,SU
Pembimbing II	: Firmansyah, SH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (30 Maret s/d 30 Mei 2012)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Padang, Kerapatan Adat Nagari Pauh V Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V Kota Padang (No.31/Pdt.G/2000/Pn.Pdg)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

Padang, 29 Maret 2012
Yaserwan, SH.,MH.,LLM of
1982 1231 1989 0110 02

mbusan :

Rektor Univ.Andalas

Dekan (sebagai laporan)

Dosen Pembimbing *IV*

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mhs yang bersangkutan

Pertinggal





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 444/UN.16.4/PP-2012
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 29 Maret 2012

Kepada Yth:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Padang
2. Pimpinan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Padang

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang , tersebut dibawah ini :

N a m a	: Tryo Nelyata
Nomor BP	: 0810112097
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Kp. Dalam Pauh Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (30 Maret s/d 30 Mei 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V Kota Padang (No.31/Pdt.G/2000/Pn.Pdg)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Pemantu Dekan I,

Yosewan, SH.,MH.,LLM &

Idp 1982 1231 1989 0110 02

embusan :

Rector Universitas Andalas
Dekan (sebagai laporan)
Dosen Pembimbing
Ketua Bagian Hukum Perdata
Mahasiswa Yang bersangkutan
Peringgal.



PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901
website : www.pn-padang.go.id

Nomor : W3.UI/2309/HK.01/VII/2012

Padang, 25 Juli 2012

Lamp : -

Perihal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian
An. TRYO NELYATA.

Kepada Yth :
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**
di.
PADANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, menerangkan bahwa :

Nama	: TRYO NELYATA ;
Tempat / Tgl. lahir	: Padang / 28 Juni 1989 ;
Pekerjaan	: Mahasiswa ;
No.BP	: 08. 101. 12097.;
Alamat	: Kp. Dalam No. 26 Kec. Pauh ;
Program Studi	: Hukum Perdata ;
Judul Skripsi	: “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Dengan Suku Koto di Nagari Pauh V Kota Padang (No.31/PDT.G /2000/PN.PDG)”
Lokasi	: Pengadilan Negeri Kls IA Padang ;

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan Skripsi seperti judul tersebut diatas, dan telah melakukan wawancara dengan Bapak FAHMIRON. SH.M.Hum, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN
NEGERI Kelas I A PADANG
PANITERA MUDA HUKUM



HA IRDAWINA. SH

NIP. 19581111 198103 2 004,-

KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH V KOTA PADANG

Hal : Surat Tanda Penelitian

Dengan Hormat,

Dengan surat keterangan ini menyatakan bahwa saudara mahasiswa yang tertera namanya di bawah ini telah pernah melakukan penelitian disini. Dengan melampirkan surat rekomendasi No. 070.07.682/Kesbang/2012 Kota Padang.

Nama : TRYO NELYATA
Tempat/Tanggal lahir : Padang, 28 Juni 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jl. Kp. Dalam No.26 Kec.Pauh
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang
Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V Kota Padang

Bahwa telah melakukan penelitian:

Narasumber : Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih
Tanggal Penelitian : 16 Mei 2012
Hasil Penelitian : Bahwa perkara ini tidak pernah diselesaikan melalui Kerapatan
Adat Nagari Pauh V

Sekian isi dari keterangan ini yang menyatakan mahasiswa tesebut telah melakukan penelitian.



H. Dusli Chan Pandito Rajo, B.A

No. 5.
TESTAMEN.

Hari ini SABTU, tanggal Satu AGUSTUS sembilan-belas ratus dua puluh lima, menghadap saya ANDRE VICTOR CHARLES LAMERS Notaris di Padang., dihariri oleh Saksi-saksi yang akan disebutkan nama-namanya yang saya kenal : -----
si PIMPING, suku Tanjung, petani berdiam di kampung Dalam Pau Lima, distrik Lubuk Begalung, afdeling Padang, daerah Keresidenan SUMATERA BARAT, menurut keterangannya lahir di Kampung Dalam Pau Lima, kira-kira tahun delapan belas ratus lima, sedangkan tanggal lahirnya oleh yang bersangkutan tidak diketahui.-----

Yang bersangkutan (komparan) diperkenalkan kepada saya oleh saksi-saksi yang dihadapkan kepada saya dan telah diuji dan atas pertanyaan bernama: MOHAMMAD SAID gelar RADJO BOEKIT dan si DAWI gelar RADJO INDO SOLTAN, pedagang, kedua-duanya berdiam (tinggal) di Padang.-----

Yang bersangkutan (komparan) si PIMPING, bermaksud untuk cara kehendak-terachir (wasiat = testamen) dengan tidak dihadiri oleh saksi-saksi, secara jelas ditulis dalam bahasa Melayu, yang oleh saya, Notaris pendapat itu dituliskan sebagai berikut :

Saya batalkan seluruh wasiat (kehendak terachir) yang dibuat sebelum ini dan mengangkat Waris satu-satunya dan yang Waris seluruhnya si RAHIM alias si BANGSEK, petani dan si ----- (tidak dapat dibaca). petani perempuan, kedua-duanya dari suku Koto, masing-masing tinggal (berdiam) di di LAMBOENG BOEKIT, PAU LIMA, yang disebut sebelum ini dan di Dalam Pau Lima yang disebut sebelum ini, dan sekali gus menetapkan mereka sebagai testamen eksekusi (pelaksanaan -- yang ada hubungan dengan harta warisan dan dalam kewenangan mereka tersebut melakukan segala kekuasaan, yang diberikan oleh Undang-undang kepada kekuasaan itu, khusus Hak untuk mengambil, menguasai dan memelihara segala warisan saya

selama waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.-----

Sebelum dibacakan dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu -
pernyataan-pernyataan (keterangan) tersebut diatas yang -
bersangkutan/pewaris (yang memberikan warisan) menyatakan
kehendak teradhirnya secara jelas dan nyata dalam bahasa:
Indonesia dan dihadiri oleh saksi-saksi, kepada saya.----

Sesudah itu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dise -
butkan kemudian, kehendak akhir ini oleh saya Notaris di
bacakan kepada Pewaris bersangkutan (comparant erflater)
diterjemahkan kedalam bahasa Melayu dan sesudah dibacakan
dalam bahasa Melayu oleh saya Notaris dihadiri oleh saksi
saksi ditanyakan kepada si Pewaris, apakah dia mengerti -
dan jelas olehnya apa yang dibacakan dan diterjemahkan -
mengenai kehendak akhirnya itu, yang dijawabnya dengan -
tegas bahwa dia mengerti.-----

- dan Akta ini :

dibuat di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas --
dihadiri oleh HENDRIK JOHANNES KORNMAHN Komis Klas satu
di kantor Assisten Residen di Bukit Tinggi, tinggal di -
Bukit Tinggi dan SYAMSUDDIN Klerk di kantor Notaris dan
tinggal di Padang sebagai saksi, dan segera sesudah di -
bacakan dan diterjemahkan kedalam bahasa Melayu keseluru-
hannya - oleh saya, ditanda tangani oleh saya dan saksi
saksi dan saya menerangkan, bahwa Pewaris (comparant erf-
later) tak bisa menuliskan namanya untuk menanda tangani,
karena dia tak pernah belajar.

Dibuat dengan dua renvooi dan tak ada penggarisan-pengga-
risan .-----

Minuut Akta ini dibuat diatas meterai dua rupiah dengan
ditanda tangani dengan baik.-----

Diberikan salinan.-

Cap
stempel.

Ditanda-tangani oleh,
A.V.G. LAFERS.



**PENGADILAN NEGERI
PADANG**

SALINAN PUTUSAN

Pengadilan Negeri No. —

Pengadilan Tinggi No. —

Mahkamah Agung RI No. 3004/K/POT/2001/PTM

PARA PIHAK / PEMOHON

1. M. N. G. Sebagai Pemohon Ku

asa

6/d

USMAN HASANUS Sebagai Ter

mohon kasasi

PUTUSAN

Nomor : 3004 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- A.I. IRMAN, bertempat tinggal di Lubuk Gajah RT.II/RW.II, Kelurahan Pisang; Kecamatan Pauh Kodya Padang, adalah anak kandung dari Dauna, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. DAUNA, bertempat tinggal di RT.02/RW.II No.12 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Pauh Kotamadya Padang, yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : 1.Septi Ernita, SH. 2. Star Sari Mulya, SH. Pengacara, berkantor di Jl.Jhoni Anwar No.120 Padang-SUMBER, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2001 ;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat A/Terbanding ;

- B. DARWAS IDRIS, bertempat tinggal di Komplek Pramuka RT.02/RW.III, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kotamadya Padang, adalah selalu ahliwaris dari Hj.NONI (alm) yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmaniar, SH. Pengacara.



dari Kantor Pengacara H.Mansyur Manan,
SH. berkantor di Jalan Bandar Purus No.61
Padang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Mei 2001 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat B/Ter-
banding ;

M e l a w a n :

1. USMAN HASAN, bertempat tinggal di Jalan
Manado No.10 Kelurahan Ulak Karang
Timur, Kecamatan Padang Utara Kodya
Padang, adalah bertindak untuk diri sendiri
dan selaku Mamak Kepala Waris dalam
kaum ;
2. ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di
RT.I/RW.II No.14 Kelurahan Kota Lalang,
Kecamatan Lubuk Kilangan Kodya Padang,
adalah selaku anggota kaum ;
3. Ir.YOSEFREDI, bertempat tinggal di
RT.01/RW.I No.2 Kelurahan Padang Besi,
Kecamatan Lubuk Kilangan Kodya Padang
adalah selaku anggota kaum, yang dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya : 1.Rosita, SH.
2.Yurli, SH. Pengacara, berkantor di Kom-
plek PGRI II Blok A No.7 Kelurahan Kurao
Pagang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8
Mei 2000 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Pembanding ;

D a n :

Dalam, Kecamatan Pauh Kodya Padang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III-A/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I.A dan Pemohon Kasasi II.B serta turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah sawah dan tanah gurun yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Pauh Kodya Padang yang para Penggugat warisi dari ninik-ninik/angku Penggugat yang bernama PIK KARO (pr) dan GAEK KARO (lk) almarhum yang beradik berkakak dan terus kepada angku Penggugat yang bernama MENE Als.PIMPING dan adiknya nenek Penggugat bernama PIK BIDUAK (pr) dan terakhir kepada para Penggugat sekarang ;

Bahwa andung para Penggugat yang nama PIK BIDUAK adalah satu-satunya adik kandung angku MENE als.PIMPING yang perempuan, pada tahun 1916 pindah dari Kampung dalam Pauh V Ke Padang Besi karena mengikuti suaminya dan sampai akhir hayatnya menetap dan berketurunan disana dan berkubur di Padang Besi. Kemudian diantara anak-anaknya ada pula yang menetap dan berketurunan di Padang Besi dan di Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kodya Padang ;

Bahwa setelah meninggal angku Penggugat GAEK PIMPING dimana hartanya banyak yang diambil orang-orang yang mengaku sebagai ahliwarisnya diantaranya Hj.NONI yang warisnya sekarang adalah Tergugat B karena pada waktu itu Hj.NONI yang termasuk



orang yang disegani sebagai kaki tangan Belanda (NIPIS) dengan demikian oleh anak-anak PIMPING dicarilah Bakonya karena Hj.NONI suku Tanjung yang mengaku waris dari PIMPI maka membakolah anak-anak PIMPING dengan isterinya PIK ANDAI kepada Hj.NONI untuk mengambil harta-harta GAEK PIMPING yang banyak tregadai pada pihak lain, maka Hj.NONI dengan anak-anak PIMPING bekerja sama untuk meyakinkan orang-orang Kampung terutama orang si Pemegang gadai bahwa Hj.NONI adalah waris yang syah dari PIMPING yang diakui oleh anak-anak PIMPING bahwa bakonya adalah Hj.NONI maka dengan mudahnya Hj.NONI untuk mengambil alih semua harta-harta pusaka PIMPING baik tanah sawah maupun tanah gurun/perladangan dan termasuk objek perkara sekarang ;



Bahwa rencana Hj.NONI untuk menguasai harta peninggalan GAEK PIMPING yang bekerja sama dengan anak-anak PIMPING (Tergugat A) yaitu Bako dengan anak pisang, maka sawah Jirat (objek perkara) diambil begitu saja oleh Hj.NONI, karena orang sipemegang gadai pada waktu itu tahu bahwa Hj.NONI adalah orang yang disegani selaku kaki tangan Belanda maka sipegang sawah Jirat yang digadai-kan oleh PIMPING beradik kakak tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, maka setelah diambilnya sawah Jirat (objek perkara) tersebut oleh Hj.NONI dihibah/diberikan kepada anak-anak PIMPING selaku anak pisangnya yang warisnya sekarang para Tergugat A ;

Bahwa perbuatan Hj.NONI yang warisnya sekarang Tergugat B yang telah mengakui selaku waris dari GAEK PIMPING dengan bekerja sama dengan anak-anak PIMPING yang warisnya para Tergugat A, supaya anak-anak PIMPING mengakui bahwa Hj.NONI adalah Bako-nya, serta perbuatan mengabil harta-harta pusaka peninggalan GAEK PIMPING yang sedang tregadai kepada pihak lain, termasuk objek perkara yang menghibahkannya kepada anak-anak PIMPING (para Tergugat A) sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan

hukum ;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir terhadap niat para ahliwaris dari anak-anak PIMPING (para Tergugat A) kalau objek perkara dialihkan dan atau dijadikan sebagai jaminan Hutang kepada pihak lain maka terhadap objek perkara dapat diletakkan sita tahan kuat dan berharga ;

Bahwa karena objek sengketa oleh para Tergugat A akan dimintakan alas hak yaitu berupa Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Nasional Tingkat II Kodya Medan, maka kami selaku para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, untuk dapat menanggihkan pengeluaran/permohonan Sertifikat Hak Milik orang para Tergugat A, atas objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;



Bahwa berdasarkan perbuatan para Tergugat A dan Tergugat B yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum maka seharusnya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya serta hak milik orang lain yang didapat darinya, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi dan atau alat Negara lainnya ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Padang tentu tidak terlepas dari biaya-biaya yang ditimbulkan oleh para ini, maka oleh sebab itu akibat biaya yang timbul oleh karena ini dibebankan kepada para Tergugat A, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng ;

Adapun yang terdapat diatas objek perkara berupa pendam perkuburan, adalah atas pengetahuan kaum Penggugat terdahulu, serta Musholla yang dipergunakan untuk kepentingan Sosial/Umum tidak menjadi tuntutan gugatan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah cucu/waris yang sah dari si Nene alias Pimping dan Pik Biduak yang berhak mewarisi segala harta pusaka peninggalan Pimping dan Pik Biduak yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang, termasuk objek perkara yang sedang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat B selaku waris dari Hj.Noni yang mengakui selaku waris dari Gaek Pimping, yang bekerja sama dengan Tergugat-Tergugat A, selaku waris dari anak-anak Pimping, serta perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat A selaku waris dari anak-anak Pimping yang mengakui bahwa Hj.Noni adalah Bakonya, serta Hj.Noni mengambil yang mengambil harta-harta peninggalan Gaek Pimping termasuk objek perkara dengan menghibah/memberikannya kepada anak-anak Pimping yang warisnya Tergugat-Tergugat A adalah merupakan perbuatan melawanhukum (On recht matigedaad) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya kalau ingkar dengan bantuan Polisi dan atau alat Negara lainnya ;
5. Menyatakan penangguhan permohonan pengeluaran Sertifikat Hak Milik atas permohonan Tergugat-Tergugat A kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Padang sampai sekarang ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;
6. Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara kuat dan berharga ;



7. Menghukum Tergugat-Tergugat A dan Tergugat B untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat A, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat A.1 dan A.2 yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa tidak benar yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A adalah Tergugat A.1 yang benarnya yang menjadi MKW dalam kaum Tergugat A adalah Dahar Epon ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 alinea 1 menerangkan adapun yang menjadi objek perkara dalah 1(satu) tumpak sawah dengan nama sawah Jirat yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Pauh Kota Madya Padang dan seterusnya sementara itu tidak ada menjelaskan lebih lanjut berapa luas objek sengketa, berapa banyak piring sawah besar kecilnya, lalu objek sengketa letaknya di RT/RW mana, dan sawah dimaksud apakah sawah kering atau sawah basah ;
- Bahwa pada halaman 2 alinea pertama gugatan Penggugat menerangkan bahwa objek perkara adalah satu tumpak sawah dengan nama sawah Jirat, sementara dalam posita gugatan Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi, berupa tanah sawah dan tanah gurun. Jadi dari sini terlihat bahwa Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya alias gugatan Penggugat kabur adanya, sebab mana yang merupakan objek sengketa apakah tanah sawah saja atau disamping tanah sawah juga tanah gurun merupakan tanah objek sengketa ;
- Bahwa objek sengketa sebelah Barat benar berbatas dengan parak si Samat Suku dibaliknya perparakan kawan tanah ini juga, yang



benarnya Utara berbatas dengan Bandar Air Cupak, dibaliknya tanah Bujang Suku Koto dan Tanyak Suku Tanjung, dan sebelah Selatan tidak benar berbatasan dengan Bandar Gadang, yang sebenarnya Selatan berbatasan dengan bandar Kampung Dalam dibaliknya dengan kawan tanah ini juga ;

- Bahwa seharusnya Isam dan Syofyan Abdullah harus ikut digugat karena mereka mendirikan rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa juga Syahrial, Asnimar Upik, Dahar Epon harus ikut digugat, karena mereka menguasai objek sengketa, ada yang menguasai 1 piring sawah, ada yang menguasai 4 piring sawah dan ada pula yang menguasai 7 piring sawah ;
- Bahwa perkara ini dulunya telah pernah diajukan oleh Penggugat pada tahun 1996 di Pengadilan Negeri Padang, subjek dan objek sama, yang mana dahulu Penggugat mendalilkan objek berasal dari nenek Penggugat nama Njani (perempuan). Dingin (perempuan), Iyek Karo laki-laki, terakhir Pimping dan Biduk terus kepada Penggugat, letaknya di Kelurahan Binuang sekarang Penggugat mendalilkan pula objek letak di Kelurahan Karo (pr) dan Gaek Karo (laki-laki) almarhum yang beradik berkakak dan terus kepada angku Penggugat Mene alias Pimping dan adiknya nenek Penggugat bernama Pik Bidua (pr) dan terakhir kepada Penggugat-Penggugat sekarang, para mana dahulu diputus N.O. jadi dari sini terlihat Penggugat mengajukan gugatan tidak konsisten, akan tetapi main coba-coba dulu letaknya di Kelurahan Binuang, sekarang Penggugat mendalilkan letak objek sengketa di Kelurahan Kampung Dalam, maka disini apakah Kelurahan Binuang sama dengan Kelurahan Kampung Dalam ;
- Bahwa juga objek sengketa sekarang ini merupakan salah satu objek gugatan Rekonpensi dalam perkara No.140/Pdt/G/1996/PN.Pdg, yang sebagai Penggugat Rekonpensinya adalah Tergugat



B, bahwa perkara mana baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI Tergugat B kalah yang isinya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat B yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Tergugat B menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat :
 - Walikotamadya Padang Cq.Camat Pauh Cq.Lurah Kampung Dalam ;
 - BPN Pusat Cq BPN Tk.I Sumatera Barat Cq.Kantor Pertanahan Kotamadya Padang ;karena kedua instansi Pemerintah tersebut sangat besar perannya dalam mengeluarkan dan membuat surat-surat tanah Tergugat A untuk mendapatkan sertifikat ;
- Bahwa Irman selaku Mamak Kepala Waris dalam perkara a quo belum pantas dan belum ada pengangkatan resminya karena masih ada lelaki tertua dalam kaum yang masih hidup ;
- Bahwa objek perkara kabur (obscure libel) karena batas-batasnya tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya ;
- Bahwa tanah pusaka di Pimping bukan tanah objek perkara saja, tetapi masih banyak lagi diantaranya ada yang Tergugat A.1 kuasai dan A.3 banyak lagi yang dikuasai oleh Tergugat B dan ada yang terletak di Kecamatan Limau Manis, Kelurahan Lumbung Bukit dan pantas untuk dipertanyakan kenapa Penggugat menggugat satu tumpak saja, kalau benar Penggugat ahliwaris dari Pimping ;



- Bahwa Mene alias Pimping tidak punya adik perempuan yang bernama Biduak, tapi Pimping adalah turunan terakhir dari Jurainya dan Pimping merupakan anak tunggal dari Ibunya Pik Lua ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan para Penggugat tersebut, telah diajukan gugatan Rekonsensi oleh para Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi ada mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Pauh yang lebih dikenal dengan nama sawah Jirai berbatas sepadan, dengan batas-batasnya seperti di dalam gugatan Rekonsensi ;
- Bahwa harta sengketa tersebut dalam perkara aquo, Penggugat Rekonsensi warisi dari angku Penggugat Rekonsensi yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonsensi yang berasal dari Nenek Penggugat Rekonsensi Kasab, Loteng dan Tukang, terakhir dikuasai oleh Angku Penggugat Rekonsensi yaitu Mene alias Pimping ;
- Bahwa setelah Pimping meninggal dunia Jurai Pimping tidak ada lagi karena Pimping adalah anak tunggal dari Ibunya Pik Lua dan Saudara-saudara sepupunya, anak dari Aciak Ciro, semuanya sudah meninggal dunia, maka harta pusaka tinggi tersebut jatuh dan diwarisi oleh Jurai Penggugat yang bermula dari Pik Intan seterusnya diwarisi oleh Uya pr seterusnya oleh Jawaher dan Hj.Noni serta oleh Masni dan sekarang turun kepada Tergugat B selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum ;
- Bahwa semasa hidupnya Pimping tersebut memang telah memisahkan harta tersebut yang sebagian dihibahkan kepada anaknya hasil perkawinannya dengan Pik Andai yaitu warisnya Tergugat A/ Tergugat II Rekonsensi sekarang ;
- Bahwa harta sengketa pernah juga diperkarakan antara Penggugat



Rekonpensi dengan Mamak Tergugat A/Tergugat II Rekonpensi yang bernama Munyar yang sampai sekarang masih diproses dalam tingkat kasasi ;

- Bahwa harta-harta dari Pimping yang merupakan pusaka tinggi kaum tetap diwarisi oleh ahliwaris menurut hukum adat Minang Kabau yaitu sebagai waris sah adalah Tergugat B/Penggugat Rekonpensi sekarang ;
- Bahwa dengan ditemuinya surat hibah wasiat oleh Tergugat A/Tergugat II Rekonpensi harus dipertanyakan kebenarannya dari wasiat tersebut dan apabila diteliti surat hibah wasiat dari Pimping kepada anak-anaknya tidaklah mungkin hibah wasiat itu berlaku untuk seluruh tanah pusaka tinggi Pimping yang dihibahkan kepada anak-anaknya dan walaupun demikian hibah wasiat tersebut harus mendapat persetujuan dari ahliwaris Pimping menurut adat Minang Kabau, kecuali harta tersebut adalah harta pencaharian suami isteri Pimping ;
- Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat A Rekonpensi/Tergugat II Rekonpensi menghilangkan lenyapkan objek perkara, maka beralasan hukumlah Penggugat mengajukan sita jaminan yang kuat dan berharga atas tanah objek perkara ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat disisi hukum, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat Rekonpensi ;



3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi dari kaum Penggugat Rekonpensi yang berasal dari Mene alias Pimping ;
4. Menghukum para Tergugat terutama Tergugat A/Tergugat II Rekonpensi untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau alat-alat Negara lainnya ;
5. Menyatakan sita jaminan kuat dan berharga disisi hukum ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ;
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusannya No.31/Pdt.G/2000/PN.Pdg, tanggal 7 Agustus 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM KONPENSI ;

I.A.DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat A.1,A.2 dan Tergugat B seluruhnya ;

I.B.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.264.000.- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonepensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Sumatera Barat di Padang dengan putusannya No.185/PDT/2000/PT.PADANG, tanggal 20 Februari 2001, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat Konpensi-Tergugat I Rekonpensi/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2000 No.31/Pdt.G/2000/PN.Pdg, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat-Tergugat/Terbanding seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat I/Pembanding sebagai Mamak Kepala Waris kaumnya ;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah waris dari MENE alias PIMPING dan PIK BIDUAK yang berhak mewarisi harta pusaka PIMPING dan PIK BIDUAK termasuk objek perkara ;
- Menyatakan tindakan Hj.NONI bersama Warisnya Tergugat B/Terbanding yang bekerja sama dengan Tergugat A/Terbanding menguasai harta pusaka tinggi PIMPING serta memberikan objek sengketa Tergugat A/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat A/Terbanding mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat-Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong agar Penggugat-Penggugat/Pembanding bebas menguasainya dan kalau ingkar dengan bantuan Polisi ;
- Menyatakan syah permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat A/Terbanding kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional TK.II Kotamadya Padang ;



- Menghukum supaya Tergugat B/Terbanding tunduk pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi Tergugat B-Konpensi dan Tergugat A Konpensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja berjumlah Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat A dan Tergugat B pada tanggal 18 April 2001 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat A dan Tergugat B dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 2 Mei 2001 dan tanggal 8 Mei 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Mei 2001 dan tanggal 30 April 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No.27/2001 dan No.28/2001 yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Mei 2001 dan tanggal 12 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat dan para Tergugat yang masing-masing pada tanggal 21 Mei 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat A dan Tergugat B diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 30 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I.A dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang sangat kabur dan menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang ragu-ragu dalam memutus perkara aquo, dan tentang siapa yang menjadi ahliwaris Pimping telah pernah diputus, diantaranya yaitu :
 - a. Dalam putusan Landraad serta terjemahannya tanggal 11 April 1930 No.28/1930, serta putusan mana telah pernah dipergunakan dalam perkara Perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Pdg. ;
 - b. Putusan Perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Pdg, putusan Landraad 1926, 1927 ;
 - c. Bahwa juga ternyata objek perkara juga telah pernah diperkarakan dikenal dengan perkara No.33/1926, akta perdamaian No.33/1926, surat Landraad Civiel Reg.No.33/1926, Surat bukti mana dalam perkara perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang ada diajukan sebagai bukti. Bahwa dalam perkara perdata No.33/1926 yang tampil waktu itu Rahim alias Bangsat yang pada waktu itu Pengadilan membenarkan seluruh perbuatan Rahim alias Bangsat mengadakan pegang gadai atas tanah objek perkara, jadi keseluruhan putusan tersebut menyebut bahwa ahliwaris Pimping adalah Rahim alias Bangsat ;
2. Bahwa juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab tak satupun saksi pihak Termohon Kasasi yang menerangkan objek perkara pusaka tinggi Pimping bersaudara. Pik



Biduak, saksi hanya menerangkan dari dahulu objek perkara dikuasai oleh anak Pimping yaitu Rahim alias Bangsat, kemudian turun pada Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang dan yang berkubur di atas objek perkara adalah anak cucu Pimping dan tidak satupun kaum Pimping yang berkubur di atas objek perkara ; Jadi dari sini terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 8 alinea ke.2 keliru dalam penerapan hukum pembuktian ;

Bahwa pihak Termohon Kasasi tidak tahu dengan batas sepadan tanah objek perkara dan juga di depan persidangan telah terbukti Kincir (Lesung) dibuat tahun 1910, hal mana dapat dilihat dalam putusan Landraad tahun 1926, 1927, 1929, 1930 sedangkan saksi Termohon Kasasi menerangkan kincir dibuat tahun 60-an dan untuk Majelis Hakim Agung ketahui Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan Pemohon kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan saksi di depan persidangan yaitu anggota kaumnya sendiri yang bernama Amir, tapi karena waktu itu Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya Pemohon Kasasi biarkan, maka dari itu jelas Termohon Kasasi berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan objek perkara baik dengan mengajukan surat bukti, maupun saksi yang direkayasa ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 8 pada alinea ke.4 dan halaman 9 tentang hubungan H.Noni dengan Pimping tidak sekaum dan tidak ada hubungan, hanya satu suku adalah tepat dan benar, karena halaman telah jelas dibunyikan di dalam surat putusan dalam perkara No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang yang putusan mana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang No.110/Pdt/G/1997/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung No.3736 K/Sip/1998 tanggal 27 Januari 2000 ;



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea pertama adalah keliru karena salah dalam penerapan hukum pembuktian ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea ke.3 adalah keliru, karena Pemohon Kasasi menguasai dan memiliki tanah objek perkara bukan berdasarkan pemberian dari H.Noni, akan tetapi sesuai dengan surat keputusan dalam perkara perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang jo putusan No.110/Pdt/G/1997/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung Reg.No.3736 K/Sip/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan akan dieksekusi tanggal 12 Mei 2001. Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka Tinggi Pemohon Kasasi yang berasal dari harta susuk yang diperdapat oleh Mamak Pemohon Kasasi yang bernama Rahim alias Bangsat dari Testament Bapaknya yang bernama Pimping, hal tersebut jelas-jelas berbunyi dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang jo putusan Pengadilan Tinggi Padang jo putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang yang menyatakan objek perkara bukan pusaka Tinggi Pimping dan H.Noni tidak berhak atas objek perkara dan perbuatan almarhum H.Noni (Ibu tua dari Termohon Kasasi B) sehingga lahir surat pengakuan tahun 1942 adalah dinyatakan merupakan perbuatan melanggar hukum ;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea ke.4 adalah keliru, karena salah menerapkan hukum pembuktian, adapun alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
- Bahwa objek perkara perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang adalah sama dengan objek perkara perdata No.31/Pdt/G/2000/PN.Padang, dimana objek perkara sekarang merupakan objek



dalam perkara gugatan Rekonpensi dalam perkara perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang jo putusan Pengadilan Tinggi No.110/Pdt/1997/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung Reg.No.3736 K/Sip/1998 ;

- Bahwa terhadap objek perkara Rekonpensi Perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang telah diberi status tertentu oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 2000, bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi yang berasal dari harta Susuk yang diperdapat oleh Mamak Pemohon Kasasi Rahim alias Bangsat dari Testament bapaknya yang bernama Pimping ;
- Bahwa juga objek gugatan dalam perkara perdata No.140/Pdt/G/1996/PN.Padang jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.110/Pdt/1997/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung Reg.No.3736 K/Sip/1998 sama dengan objek gugatan dalam perkara No.31/Pdt/G/2000/PN.Padang, bahwa dimana dalam gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara No.140 Pemohon Kasasi mendalilkan objek perkara merupakan Pusaka Tinggi Pemohon Kasasi yang berasal dari harta Susuk yang diperdapat oleh Mamak Pemohon Kasasi Rahim alias Bangsat dari Testament bapaknya yang bernama Pimping, sedangkan Termohon Kasasi dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka Tinggi Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II.B dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum mana patut di-kesampingkan dengan alasan karena :
Bahwa jika diteliti dan dibaca bukti TB.I yaitu Ranji keturunan kaum



Tergugat B/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dan surat bukti TB.II berupa surat keterangan dan pengakuan tanggal 10 Guton 28 Nichi Syawal 7/2002 (1942) tahun Jepang, maka jelas dan terbukti antara Mene alias Pimping dengan Hj.Noni dan Tergugat B/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi Seranji, seharga pusaka dan sehingga semalu, maka setelah Mene alias Pimping meninggal dunia, satu-satunya waris yang berhak mewarisi harta pusaka adalah Hj.Noni beserta warisnya yaitu Pemohon Kasasi sekarang ini dan kebenaran ini didukung pula oleh saksi Pemohon Kasasi yang bernama Bukhari (mohon dilihat putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 48 poin 14 tentang keterangan saksi Bukhari) ;

Bahwa TB.IV, TB.V, TB.VIII s/d TB.X yaitu berupa surat pagang gadai dan penebusannya, juga membuktikan bahwa Hj.Noni waris dari Mene alias Pimping, dimana setiap pagang gadai yang dibuat oleh Mene alias Pimping pada umumnya ditebus oleh Hj.Noni selaku waris yang sah dari Pimping ;

Bahwa TB XIV dan TB.XV yaitu berupa novis Pengadilan Negeri Padang perdata No.329/1952 dan vonis Pengadilan Tinggi Padang No.65/1857, membuktikan bahwa Hj.Noni juga waris dari Mene alias Pimping ;

Bahwa dari keterangan saksi Jamaludin Rajo Kuaso dan Bukhari juga menerangkan bahwa antara Pimping dengan Hj.Noni bermamak berkemenakan, seharga pusaka dan sehina semalu ;

Jadi dari bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, jelas dan terang antara Pimping dengan Hj.Noni sekaum dan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, akan tetapi judex facti disini tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sedikitpun bukti-bukti dari Tergugat B/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi ;

- Bahwa jika dibandingkan surat bukti TB.I dengan P.I dari Termohon



Kasasi jelas suatu bukti P.I yang baru diciptakan pada tahun 1976 oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai nilai hukum pembuktian sama sekali dan dapat dilumpuhkan dengan adanya TB.I yang dibuat pada zaman Jepang (1942). Jadi jelaslah disini waris yang sah dari Mene alias Pimping adalah Hj.Noni, bukan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi, walau saksi Termohon Kasasi Rosma, Azis Raji Alam dan Zarkani menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi waris Pik Biduak dan Pimping tetapi keterangan para saksi tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena saksi hanya mendengar cerita dari orang lain yang belum tentu benar, sedangkan para saksi yang ditampilkan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak tahu persis dengan asal usul dari objek perkara, begitu juga halnya mengenai keturunan dari Mene alias Pimping ;



Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa telah diberi status hukum tertentu dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap T.A.1.2/I dan T.A.1.2/II dimana ditentukan bahwa ahliwaris Pimping adalah Rahim alias Bangsat, meskipun subjek perkara sekarang ini berkurang ataupun ada subjek lain, tetapi pada dasarnya subjek yang berperkara tersebut, sama saja, demikian pula objek sengketa, meskipun didalilkan harta pusaka tinggi tetapi objek sengketa tersebut sama dengan objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah diberi status tertentu oleh Pengadilan (putusan Pengadilan Negeri Padang

No.140/Pdt.G/1996/PN.Padang jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.110/Pdt.G/1997/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung No.3736 K/Sip/1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I-A : IRMAN, sebagai anak kandung dari Dauna, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, 2.DAUNA, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.185/PDT/2000/PT.PADANG, tanggal 20 Februari 2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.31/Pdt.G/2000/PN.PDG, tanggal 7 Agustus 2000 tersebut, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan pengadilan Negeri Padang No.31/Pdt.G/2000/PN.PDG, tanggal 7 Agustus 2000 yang telah tepat dan benar yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : A : 1.IRMAN,
2.DAUNA, dan Pemohon Kasasi II-B :DARWAS IDRIS, tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.185/PDT/

2000/PT.PADANG, tanggal 20 Februari 2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.31/Pdt.G/2000/PN.PDG, tanggal 7 Agustus 2000 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI ;

I.A.DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat A.1,A.2 dan Tergugat B seluruhnya ;

I.B.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 22 FEBRUARI 2006 dengan H.Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B.Ngurah Adnyana, SH. dan Dr.H.Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh I.B.Ngurah Adnyana, SH. dan Dr.H.Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Putut Setiyono, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak di-



hadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

I.B.Ngurah Adnyana, SH.

ttd./-

Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-

H.Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i, Rp. 6.000,-

ttd./-

2. R e d a k s i, Rp. 1.000,-

Putut Setiyono, SH.

3. Administrasi Kasasi, ... Rp.193.000,-

Jumlah Rp.200.000,-


=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata, 


MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. : 040030169

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

Diterangkan bahwa perkara Reg.No.3004 K/Pdt/2001/MA.ini telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi tanggal 23 November 2006, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Padang ;.....

Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA.
P a d a n g

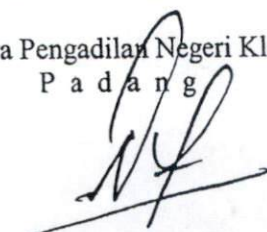


NASRUN, SH.
NIP.040029163,-

Foto Copy yang sah sesuai dengan aslinya perkara Perdata Reg. No.3004 K/Pdt/2001.MA. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Kasasi : IRMAN, pada hari ini kamis tanggal 23 November 2006, oleh saya ;.....

Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA.
P a d a n g


NASRUN, SH.
NIP. 040029163,-

Biaya-biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Sampul	Rp. 3.000,-
Upah tulis	Rp. 5.000,-
Foto Copy	Rp. 2.000,-

23/11-06

Jumlah Rp. 16.000,-

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA